



LKIP

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

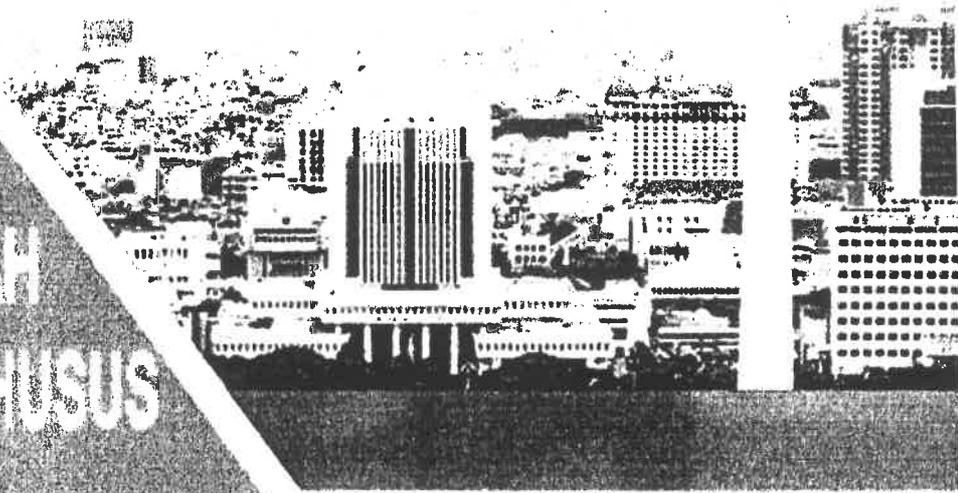


TAHUN **2017**



LKIP

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH



SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH KHUSUS
KOTA JAKARTA

TAHUN **2017**



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KATA PENGANTAR

Penyusunan Buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017, dimaksudkan untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan atas capaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu Tahun 2017. Dengan adanya pelaporan akuntabilitas kinerja, para pemangku kepentingan dapat mengetahui capaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, materi LKIP disajikan secara obyektif dan transparan serta mengungkapkan sejumlah indikator kuantitatif dan kualitatif yang menyangkut tugas, fungsi dan program kerja serta kegiatan, sebagai bagian dari upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara umum, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam membantu Gubernur menyusun kebijakan Pemerintah Daerah dan mengoordinasikan Perangkat Daerah, telah diselenggarakan sebagaimana mestinya.

Semoga LKIP Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 dapat bermanfaat kepada seluruh jajaran di Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam mengevaluasi kinerjanya dan mengantisipasi kendala/hambatan yang terjadi di masa mendatang. Bagi pimpinan, diharapkan LKIP ini dapat dijadikan bahan masukan dalam menyusun LKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Jakarta, 16 Maret 2018

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,





**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017, dimaksudkan untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan atas capaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu tahun 2017. Dengan adanya pelaporan akuntabilitas kinerja, para pemangku kepentingan dapat mengetahui capaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, materi LKIP disajikan secara obyektif dan transparan serta mengungkapkan sejumlah indikator kuantitatif dan kualitatif yang menyangkut tugas, fungsi dan program kerja serta kegiatan, sebagai bagian dari upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara umum, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam membantu Gubernur menyusun kebijakan pemerintahan daerah dan mengkoordinasikan perangkat daerah, telah diselenggarakan sebagaimana mestinya.

Semoga LKIP Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 dapat bermanfaat kepada seluruh jajaran di Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam mengevaluasi kinerjanya dan mengantisipasi kendala/hambatan yang terjadi di masa mendatang. Bagi pimpinan, diharapkan LKIP ini dapat dijadikan bahan masukan dalam menyusun LKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Jakarta, Maret 2018

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta,

Saefullah
NIP 196402111984031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	I-1
B. Pembentukan.....	I-2
C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	I-2
D. Struktur Organisasi	I-3
E. Personil Sekda.....	I-4
F. Aspek Strategis.....	I-5
G. Permasalahan dan Arah Kebijakan.....	I-5
H. Tujuan Penyusunan LKIP	I-5
I. Sistematika Penulisan.....	I-6
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Perencanaan Kinerja	II-1
B. Perjanjian Kinerja.....	II-9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Sekretariat Daerah	III-1
B. Realisasi Anggaran.....	III-50
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	IV-1
Lampiran 1 Bagan Pola Struktur Organisasi Sekretariat Daerah	
Lampiran 4 Formulir Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah	

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah 2016	II-9
Tabel III.1	Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2016	III-2
Tabel III.2	Keseluruhan Capaian Biro Tata Pemerintahan.....	III-17
Tabel III.3	Capaian Jumlah Produk Hukum yang diharmonisasi.....	III-18
Tabel III.4	Peningkatan Penyelesaian dalam peradilan Tahun 2015-2017	III-19
Tabel III.5	Jumlah Sengketa terselesaikan dari Tahun 2015-2017.....	III-20
Tabel III.6	Tabel Perbandingan Nilai LKIP Tahun 2015-2016.....	III-27
Tabel III.7	Perbandingan Capaian Pelaksanaan Koordinasi.....	III-35
Tabel III.8	Terkumpulnya dan Terkelolanyadata yang diperlukan dalam perumusan kebijakan.....	III-37
Tabel III.9	Perbandingan Persentase Capaian Tahun 2015-2017	III-42
Tabel III.10	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2017 Biro ASD	III-46
Tabel III.11	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2015-2017 Biro ASD	III-47
Tabel III.12	Realisasi Anggaran Biro ASD	III-48
Tabel III.13	Tabel Capaian Sasaran Strategis Blro Dikmental Tahun 2017	III-51
Tabel III.14	Tabel Realisasi Anggaran Blro Dikmental Tahun 2017	III-51
Tabel III.15	Tabel Realisasi dan Prosentase Anggaran Blro Dikmental Tahun 2017	III-51
Tabel III.16	Tabel Realisasi Anggaran Capaian IKU Sekretariat Daerah Tahun 2017	III-51

DAFTAR GRAFIK

Grafik I.1	Pegawai Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta 2016.....	I-4
Grafik III.1	Perbandingan Koordinasi Kebijakan Biro Tata Pemerintahan ..	III-9
Grafik III.2	Perbandingan Peningkatan Kerjasama Anatar Daerah dan LN	III-16
Grafik III.3	Jumlah Keanggotaan dan Parisipasi daerah dan international .	III-16
Grafik III.4	jumlah kerjasama sister city Tahun 2016-2017.....	III-17
Grafik III.5	Capaian Biro KDH Tahun 2016-2017	III-18
Grafik III.6	Target dan Capaian Indikator Tahun 2016-2017.....	III-20
Grafik III.7	Grafik Perbandingan Capaian 2015-2017 Biro PKLH.....	III.-21
Grafik III.8	Perbandingan Capaian PKLH Tahun 2015-2017.....	III-22
Grafik III.9	Perbandingan Capaian Tahun 2015-2017 Biro PKLH	III-23
Grafik III.10	Persentase data asset yang telah dicacah dan dikelola	III-27
Grafik III.11	Indeks Kepuasan Layanan Pembayaran Perjalanan Dinas	III-30
Grafik III.12	Perbandiangan Tersusunnya Kebijakan Tahun 2015-2017	III-40
Grafik III.13	Realisasi Anggaran Biro Dikmental Tahun 2015-2017	III-50

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 fungsinya untuk melaporkan Capaian Kinerja (*Performance results*) sepanjang tahun anggaran 2017 yang merupakan gambaran hasil dari Rencana Kinerja (*Performance plan*) 2017 yang sepenuhnya mengacu pada perjanjian kinerja masing-masing biro Sekretariat Daerah Tahun 2017.

Selama periode tahun 2017 ini kesepuluh Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta menetapkan perjanjian kinerja yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) sasaran strategis dengan 33 (tiga puluh tiga) indikator kinerja yang mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam mewujudkan misi dan visi Sekretraiat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Kedua puluh dua sasaran strategis tersebut telah mewakili tugas pokok dan fungsi seluruh Biro yang terdapat dalam Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta ini dilakukan dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kewajiban setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kepada atasan masing-masing. Pertanggungjawaban tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan kegiatan.

LKIP 2017 ini disajikan beberapa pokok permasalahan berupa keberhasilan maupun kegagalan kinerja organisasi secara menyeluruh, yaitu:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 250 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.
2. Sekretariat Daerah beserta segenap jajarannya telah berupaya secara optimal melaksanakan peran dan fungsinya membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
3. Dalam pencapaian sasaran strategis dari 24 (dua puluh empat) sasaran strategis yang ditetapkan, telah berhasil diwujudkan dengan baik. Keberhasilan tersebut dapat tercapai untuk memperbaiki kinerja masing-masing Biro-Biro yang berdampak positif bagi kinerja Sekretariat Daerah secara keseluruhan.

Berikut merupakan ringkasan dari sasaran strategis atau indikator kinerja Utama Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Koordinasi Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan di bidang Tata Pemerintahan dan Aparatur	1 Tersusunnya draft Rancangan UU Revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009	1 Draft Rancangan UU	1 Draft Rancangan UU	100%
		2 Tersusunnya dan terlaksananya Implementasi Kebijakan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan	Draft Perda RT/RW	1 NA 1 Draft Perda RT/RW	100%
		3 Kesepakatan 3 Bidang Kerjasama dengan daerah perbatasan Jakarta meliputi Baku Mutu Air, Transportasi dan RTH	8 KB dan 36 PKS Perjanjian Kerjasama antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Bodetabekjur, Provinsi Lainnya dan Lembaga/Badan	29 KB Provinsi/Kota Perbatasan dan Lembaga/Badan 78 PKS dengan Provinsi /Kabupaten Lain, Provinsi/kota dan Lembaga/Badan	243%
FUNGSI HUKUM					
1	Meningkatnya jumlah Raperda/Perda dan Rapergub/Pergub yang dievaluasi dan disempurnakan	1 Jumlah Produk Hukum yang diharmonisasi	10 Produk hukum daerah	13 Produk hukum daerah	130%
2	Meningkatnya penyelesaian hukum dan penanganan perkara	1 Jumlah perkara pengadilan yang tertangani	40 Perkara	65 Perkara	162.5%
		2 Jumlah sengketa terselesaikan dan terkoordinasi	250 sengketa	177 sengketa	70.08%
FUNGSI ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI					
1	Meningkatnya penataan SDM yang sesuai dengan kelembagaan yang tepat ukuran dan tepat fungsi	1 Tersusunnya formasi jabatan, kelas jabatan dan nilai jabatan	42 Pergub	42 Pergub	100
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	1 Peningkatan penilaian predikat LKIP	BB	B	92,91%

FUNGSI KEPALA DAERAH DAN KERJASAMA LUAR NEGERI								
1	Meningkatnya hubungan, kerjasama dan partisipasi daerah pada event dan organisasi inter-nasional yang efektif dan efisien	1	Jumlah keanggotaan dan partisipasi daerah dalam Organisasi Internasional	11 organisasi internasional	20 Organisasi internasional	182%		
				18 event internasional	23 event internasional	128%		
2	Meningkatnya kerjasama sister city yang mendukung pelaksanaan 9 program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	1	Jumlah kerjasama Sister City	1 calon sister city	3 calon sister city	300%		
				9 isu	9 isu	100%		
				4 kota aktif melaksanakan program	13 kota aktif melaksanakan program	325%		
				Kunjungan 4 sister city	Kunjungan 5 Sister City	125%		
				30 Peserta	31 Peserta	103%		
3	Meningkatnya pelayanan keprotokolanan dan administrasi Pimpinan Daerah yang professional dan efisien	1	Terlaksananya Aktifitas Keprotokolanan Daerah	1.400 acara	2.370 acara	169%		
				1.400 agenda	2.187 Agenda	156%		
				100% TL Surat Gub/Wagub/ Sekda/Deputi	100% TL Surat Gub/ Wagub/Sekda/Deputi	100%		
4	Meningkatnya Produktivitas Aparat	1	% Rata rata kinerja SDM KDH dan KLN	90%	98,66%	110%		
FUNGSI PEREKONOMIAN								
1	Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan membina KUMKM, Industri, Energi dan Perdagangan Usaha, Perhubungan, Pariwisata, Ketenagakerjaan, Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan, Penanaman Modal dan Promosi dan BUMD	1	Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Transportasi di Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		
				2	Pantauan harga pangan Strategis di Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
				3	Monitoring pelaksanaan Perizinan/non Perizinan Bidang Perekonomian pada PTSP di Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
				4	Monitoring, Evaluasi dan Perumusan Kebijakan Koperasi dan UMKM di Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
				5	Tim Pengendalian Inflasi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

FUNGSI PENATAAN KOTA DAN LINGKUNGAN HIDUP						
1	Optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten	1	Terlaksananya koordinasi yang intensif, efektif dan efisien	250 kali pelaksanaan koordinasi	464 Kali Pelaksanaan Koordinasi	185,6%
2	Meningkatnya pelaksanaan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dan berketahanan dalam menghadapi resiko bencana dan dampak perubahan iklim	1	Terkumpul dan terolahnya data yang diperlukan dalam perumusan kebijakan	20 dokumen PPK	26 Dokumen PPK	130%
		2	Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan kegiatan koordinasi	12 laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi	52 Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi	433,3%
FUNGSI UMUM						
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan kerumahtanggaan dilingkungan kompleks gedung Balaikota	1	Persentase berkurangnya keluhan terhadap pelayanan kebersihan, AC, Air, Lift, dan Lampu Penerangan Kantor	20%	20 %	100 %
2	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi surat-menyurat	1	Lama penyelesaian tiknet naskah dinas yang ditandatangani Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda (Kurang dari 40 lembar)	2 hari	2 hari	100 %
3	Meningkatnya kualitas keamanan dan ketertiban di lingkungan Balaikota	1	Persentase menurunnya kasus tindak criminal	20%	20 %	100 %
4	Meningkatnya produktifitas Aparat Biro Umum	1	Persentase Aparat yang kompeten	90%	90 %	100 %
FUNGSI ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH						
1	Meningkatnya pelayanan administrasi surat-menyurat dinas Sekretariat Daerah, deputi Gubernur dan Asisten Sekda yang ditandai dengan	1	Persentase naskah dinas yang ditandatangani tepat waktu	100%	100%	100%

	singkatnya waktu pengurusan, tepatnya sasaran dan efisiensinya biaya yang dikeluarkan					
2	Terkelolanya keuangan dan aset Sekretariat Daerah yang tertib dan teratur	1	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu, tepat jumlah dan tepat orang sesuai listing	100%	100%	100%
		2	Indeks Kepuasan layanan Pembayaran Perjalanan Dinas DKPD/UKPD	3.00	3.00	100%
3	Terkelolanya asset Sekretariat Daerah dengan tertib dan teratur	4	Persentase data asset yang telah dicacah dan dikelola	800 data asset	800 data asset	100%
FUNGSI KESEJAHTERAAN SOSIAL						
1	Tersusunnya Kebijakan kesehatan, social dan Pemberdayaan	1	Jumlah kebijakan kesehatan, sosial dan pemberdayaan yang tersusun	5 rancangan kebijakan	15 kebijakan	300%
2	Terkoordinasi, Termonitor dan Terevaluasinya Pelaksanaan kebijakan Kesehatan, social dan PEmberdayaan	1	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan	7 Dokumen laporan	8 dokumen	114,29%
FUNGSI PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL						
1	Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan pendidikan, keolahragaan, kepemudaan, perpustakaan daerah dan kearsipan daerah serta mental spiritual	1	Jumlah kebijakan pendidikan, olahraga dan pemuda, perpustakaan dan kearsipan serta mental spiritual yang disusun	21 bahan kebijakan	27 Kebijakan	128,6%
2	Terkoordinasinya, termonitor dan terevaluasinya kebijakan penyelenggaraan pendidikan, keolahragaan,	1	Jumlah koordinasi pendidikan, olahraga dan pemuda, perpustakaan dan kearsipan serta mental spiritual yang dilakukan	9 dokumen	9 dokumen	100%

	kepemudaan, perpustakaan daerah dan kearsipan daerah serta mental spiritual					
3	Terlayannya Jemaah haji Provinsi DKI Jakarta dengan baik	1	Persentase Jemaah haji yang mendapatkan tambahan layanan dan Pembinaan ibadah haji	100%	100%	100%

Dari sasaran strategis yang telah tercapai tersebut, masih terdapat beberapa perbedaan dipandang dari sudut indikator kinerja. Hal ini terlihat pada indikator kinerja yang digunakan dalam pencapaian sasaran adalah pada tingkat *output*.



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi sebagai wujud *good governance* dengan prinsip pemerintahan yang bersih, transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Wujud *good governance* tersebut dilakukan melalui peningkatan aparatur negara yang berprestasi, berkinerja tinggi, disiplin, kompeten dan beretika yang semuanya mengarah pada upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah serta mengingat arti pentingnya akuntabilitas kinerja maka salah satu wujud upaya untuk mengetahui dan meningkatkan kinerja pemerintah tersebut adalah dengan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih. Secara umum Laporan ini merupakan naskah pertanggungjawaban kinerja suatu instansi atas Rencana Strategis maupun rencana tahunan yang telah disusun oleh Instansi Pemerintah. Melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pihak-pihak yang berkepentingan akan mengetahui keberhasilan ataupun kegagalannya dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pandangan yang lebih luas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik, sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundangan yang antara lain adalah :

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;



- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan Seluruh Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kemampuan menjalankan sumber daya yang dimiliki.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara review Atas Laporan Kerja Kinerja Instansi Pemerintahan mengacu pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).
- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2013-2017.

B. PEMBENTUKAN

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Perangkat Daerah ini terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

Implementasi dari peraturan daerah tersebut maka ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 250 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Kedudukan

Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Tugas

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengordinasian administrative terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif



Fungsi

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat Daerah;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat Daerah;
- c. penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;
- d. pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah oleh Perangkat Daerah;
- f. pembinaan administrasi dan aparatur Daerah;
- g. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan kerumahtanggaan pimpinan dan Sekretariat Daerah;
- h. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan Pemerintah Daerah;
- i. pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, transparansi, akuntabilitas dan pelaporan Perangkat Daerah;
- j. penyelenggaraan urusan hukum, kerjasama Daerah dan protokol;
- k. fasilitasi dan pengoordinasian fungsi perekonomian, pembangunan dan lingkungan hidup, kesejahteraan sosial serta mental spiritual;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur; dan

D. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan;
- c. Asisten Administrasi dan Keuangan;
- d. Asisten Perekonomian;
- e. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
- f. Asisten Kesejahteraan Rakyat; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Pemerintahan terdiri dari :

- a. Biro Tata Pemerintahan;
- b. Biro Hukum;
- c. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi; dan



d. Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri.

Asisten Administrasi dan Keuangan terdiri dari :

- a. Biro Umum; dan
- b. Biro Administrasi dan Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah.

Asisten Perekonomian terdiri dari :

- a. Biro Perekonomian.

Asisten Pembangunan dan Lingkungan hidup terdiri dari

Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup.

Asisten Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :

- a. Biro Kesejahteraan Sosial; dan
- b. Biro Pendidikan dan Mental Spritual.

Biro dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi.

E. PERSONIL SEKRETARIAT DAERAH

Dalam menunjang Kinerja Gubernur Provinsi DKI Jakarta khususnya Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta mempunyai Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak **820** pegawai per 31 Desember 2017.

Pegawai Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta



Sumber : Badan Kepegawaian Daerah per 31 Desember 2017



F. ASPEK STRATEGIS

Posisi dan peranan perangkat Sekretariat Daerah didalam membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana, serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah, merupakan posisi yang sangat strategis. Dalam implementasi benchmark position dan benchmark job Sekretariat Daerah tersebut adalah Mengelola Manajemen Pemerintahan Daerah Menuju Pemerintahan yang akuntabel.

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Sekretariat Daerah menjadi garda terdepan manajemen pemerintah daerah yang menjadi motivasi untuk prestasi kerja.

G. PERMASALAHAN DAN ARAH KEBIJAKAN

Kota Jakarta adalah kota multi etnis dengan penduduk yang terdiri dari beraneka macam suku, budaya, Bahasa dan agama sehingga permasalahan yang di hadapi oleh Pemerintah Provinsi Jakarta sangat rumit, sehingga didalam membangun dan mengatur pola kehidupan di Jakarta harus mendalam dan saling terkait sehingga penanganannya harus menyeluruh menyentuh akar permasalahan.

Adalah menjadi kewajiban seluruh perangkat daerah untuk mendukung operasionalisasi termasuk Sekretariat Daerah untuk bekerja bahu membahu untuk menangani permasalahan tersebut.

Sehingga di dalam menentukan arah kebijakan yang ditempuh adalah meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah daerah dan pengelolaan sumber daya daerah secara berkesinambungan.

H. TUJUAN PENYUSUNAN LKIP

Di era keterbukaan dan reformasi birokrasi seperti sekarang ini menuntut perubahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan selalu mengakomodir kebutuhan yang berorientasi kepada aspirasi masyarakat dengan berazaskan prinsip prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan.



Sehingga dalam kondisi seperti ini dituntut adanya kerangka berpikir yang terstruktur untuk lebih memberdayakan fungsi publik agar sesuai dengan tuntutan perkembangan politik, ekonomi dan sosial budaya. Peningkatan etos kerja dan budaya yang berorientasi kepada pencapaian hasil serta pertanggungjawab berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju pemerintahan yang bersih yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme melalui kerja yang efektif dan efisien.

Untuk hal tersebut di atas maka Sekretariat Daerah melaksanakan pengukuran kinerja yang merupakan manifestasi sejauh mana keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi. Dengan satuan pengukuran yang baku maka pengukuran kinerja ini dapat dilakukan dengan baik. Pengukuran yang tepat akan sangat tergantung pada system informasi yang ada untuk menyampaikan data yang tepat dan akurat.

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi kerja, maka disusun Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Propinsi DKI Jakarta tahun 2017. Dengan Peraturan Presiden ini memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan laporan akuntabilitas kinerja yang utuh yang disusun dalam suatu system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Secara teknis LKIP ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 perihal Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan laporan Kinerja Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta setiap tahun menetapkan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja disusun dan dikembangkan untuk menilai capaian kinerja Sekretariat Daerah Propinsi DKI Jakarta yang berhasil diwujudkan. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan capaian kinerja yang berhasil diwujudkan tersebut dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).



I. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran singkat tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah serta Sistematika Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2017. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi perbandingan Antara target dan realisasi kinerja tahun 2017. Perbandingan Antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017 dengan tahun 2016 dengan target 2018 berdasarkan dokumen RPJMD tahun 2013 sampai tahun 2017. Untuk beberapa indikator realisasi kinerja tahun 2017 dibandingkan dengan standar nasional. Analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 dan upaya/langkah dan di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Sekretariat Daerah dalam rangka peningkatan kerjanya.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Prioritas pembangunan daerah tahun 2017 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2017 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017. Prioritas pembangunan daerah merupakan arahan bagi SKPD dalam menjabarkan program dan kegiatan yang dibutuhkan pada tahun 2017, dan berkorelasi dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Didalam RPJMD 2013-2017, program pembangunan dikelompokkan ke dalam empat kelompok yaitu:

- a. Program Unggulan, adalah program yang menjadi prioritas utama Gubernur dalam pencapaian visi – misi RPJMD
- b. Program Prioritas, adalah program yang menjadi fokus daerah dalam pencapaian visi misi RPJMD
- c. Program Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal, adalah program dalam rangka pelaksanaan tupoksi SKPD khususnya yang terkait dengan pelayanan publik maupun tugas-tugas birokrasi lainnya
- d. Program Operasional SKPD, adalah program yang mewadahi kebutuhan minimal beroperasinya sebuah SKPD dalam melaksanakan tupoksinya

Program Unggulan sebagaimana dimaksud diatas berdasar pengelompokan isu adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Pengembangan Sistem Transportasi

- a. Program Pembangunan Angkutan Umum Berbasis Jalan, berupa
 - 1) Pengembangan koridor Busway
 - 2) Penambahan armada Busway
 - 3) Penataan trayek dan peremajaan armada bus sedang
- b. Program Pembangunan Angkutan Massal Berbasis Rel
 - 1) Pembangunan *Mass Rapid Transit* (MRT)
 - 2) Pembangunan *Light Rapid Transit* (LRT)
- c. Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan
 - 1) Pembangunan *Fly Over* dan *Underpass*

2) Pembangunan jalan tembus

2. Prioritas Antisipasi Banjir, Rob, Dan Genangan

a. Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendali Banjir

1) Pengembangan situ, waduk dan embung

2) Penguatan tanggul

3) Pembuatan sumur resapan dan lubang biopori

4) Pembangunan Terowongan bawah tanah multifungsi

b. Program Pengembangan Sistem Drainase

1) Pengembangan sistem polder

2) Normalisasi sungai dan saluran

3) Pengerukan sungai dan saluran

3. Prioritas Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Kota

a. Program Penyediaan Perumahan Rakyat

Pembangunan rumah susun sewa yang terpadu dengan fasilitas pasar, kesehatan dan olah raga

b. Program Kebijakan Pengembangan Perumahan

Mendorong pembangunan hunian vertikal

c. Program Peningkatan Kualitas dan Perbaikan Kampung

Penataan kampung dan lingkungan kumuh

4. Prioritas Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

1) Pembangunan Sarana Prasarana TPS Standar Ramah Lingkungan di 5 wilayah kota

2) Pembangunan Tempat Transit Sampah Pesisir dan Pantai Pulau Pemukiman di Kepulauan Seribu

b. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1) Swastanisasi Penanganan Kebersihan di 44 Kecamatan

2) Penanganan Sampah Pesisir dan Pantai Pulau-pulau di Kabupaten Adm. Kep. Seribu, Pesisir dan Pantai Utara Jakarta, serta Muara 13 (Tiga Belas) Sungai di Teluk Jakarta

3) Penanganan Sampah Sungai

- 4) Penanganan Sampah di Saluran Mikro, Penghubung dan Taman di 5 wilayah kota
- c. Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Pembangunan Sistem Informasi dan Pengawasan Penanganan Sampah

5. Prioritas Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH

- a. Program Peningkatan Kuantitas RTH Pertamanan dan Pemakaman
 - 1) Penambahan RTH melalui pembelian lahan dan kontribusi pengembang
- b. Program Pemberdayaan dan Penggalangan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Pertamanan dan Pemakaman
 - 1) Penggalangan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan dan pemeliharaan RTH Publik/penghijauan lingkungan

6. Prioritas Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja

- a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Koperasi dan UMKM
 - 1) Penyediaan ruang bagi ekonomi informal/PKL pada kawasan perkantoran dan perdagangan
 - 2) Membangun mall khusus bagi PKL
 - 3) Memperbaiki pasar-pasar tradisional

7. Prioritas Pembangunan Budaya Multi-Kultur

- a. Program Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan
Pengembangan karakter kota berciri khas betawi
- b. Program Pengembangan Promosi dan Informasi Kebudayaan
Penyelenggaraan event budaya bertaraf internasional
- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan
 - 1) Pengembangan pusat kebudayaan Betawi
 - 2) Revitalisasi kota tua
- d. Program Pemeliharaan dan Pembangunan gedung Pemda
Pembangunan Masjid Raya Jakarta

8. Isu peningkatan pelayanan publik

- a. Program Sistem Informasi dan Teknologi Pajak Daerah
Pengembangan pelayanan pajak online
- b. Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan
Pelayanan prima di Kelurahan
- c. Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kecamatan
Pelayanan prima di Kecamatan
- d. Program peningkatan Investasi
Pengembangan layanan perijinan secara online
- e. Program Penataan dan Pengelolaan Ketatalaksanaan Kota/Kabupaten
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

9. Prioritas Peningkatan Kualitas Pendidikan

- a. Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun
 - 1) Wajib Belajar 12 tahun
 - 2) Penerapan KARTU JAKARTA PINTAR
- b. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan
 - 1) Peningkatan Daya Tampung Peserta Didik
 - 2) Peningkatan Kualitas Gedung Sekolah
- c. Program Peningkatan Mutu Pendidikan
Peningkatan kualitas dan kuantitas guru

10. Isu Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat

- a. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah
Pemberlakuan KARTU JAKARTA SEHAT
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan
 - 1) Pengembangan Puskesmas Kecamatan menjadi Rawat inap selain RB
 - 2) Penambahan kapasitas Tempat Tidur kelas tiga pada RSUD
 - 3) Pelayanan kesehatan Masyarakat di pasar-pasar tradisional/ rumah susun
- c. Program Pembinaan Upaya Kesehatan
Pembentukan Kelurahan Siaga Aktif
- d. Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Penerapan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kelurahan

Program Prioritas sebagaimana dimaksud diatas berdasar pengelompokan misi dan isu strategis adalah sebagai berikut:

Misi 1 :

1. Isu Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota

- a. Program perencanaan tata ruang
- b. Program pemanfaatan ruang
- c. Program Pengawasan dan Penertiban Bangunan
- d. Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang
- e. Program Pemberdayaan komunitas penyelenggara bangunan gedung
- f. Peningkatan Pelayanan Ketataruangan
- g. Program Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang

2. Isu Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja

- a. Program Peningkatan Pelayanan Perdagangan Dalam Negeri
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Koperasi dan UMKM
- c. Program Pengembangan Kelembagaan Koperasi
- d. Program Penyediaan Dana Bergulir dan Kemitraan Koperasi dan UMKM
- e. Program Pemberdayaan UMKM
- f. Program pengamanan ketersediaan pangan, pengendalian Akses, Harga, Promosi, dan Distribusi/Pemasaran
- g. Program peningkatan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan hasil tanaman pangan dan hortikultura
- h. Program peningkatan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan hasil perikanan
- i. Program peningkatan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan produk hewan (kesmavet)
- j. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- k. Program Penguatan sistem dan fasilitas pendukung pusat pelatihan kerja
- l. Program peningkatan kesempatan Kerja dan peningkatan sistem pelayanan
- m. penempatan tenaga kerja

3. Isu Pembangunan Energi dan Telematika Jakarta

- a. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
- b. Program Pembinaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral.

Misi 2 :

1. Isue Pengembangan Sistem Transportasi

- a. Program Pembangunan Angkutan Umum Berbasis Jalan
- b. Program Pembangunan Angkutan Massal Berbasis Rel
- c. Program Pembangunan Transportasi Perairan
- d. Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan
- e. Program Peningkatan Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan
- f. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
- g. Program Pembangunan Transportasi Ramah Lingkungan
- h. Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan

2. Isue Antisipasi Banjir, Rob, Dan Genangan

- a. Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendali Banjir
- b. Program Pengembangan Sistem Drainase
- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
- d. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya
- e. Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Drainase

3. Isue Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- a. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Limbah
- b. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih
- c. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- d. Program Pengurangan Timbulan Sampah di Sumber
- e. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- f. Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
- g. Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
- h. Program Pengurangan Resiko Bencana dan Kesiapsiagaan Pra Bencana

- i. Program Peningkatan Sarana, Prasarana Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Misi 3 :

1. Isu Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Kota

- a. Program Penyediaan Perumahan Rakyat
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perumahan Rakyat
- c. Program Penyiapan Masyarakat Calon Penghuni Rumah Susun
- d. Program Kebijakan Pengembangan Perumahan
- e. Program Koordinasi Serah Terima Rusun yang Dibangun Oleh APBN
- f. Program Peningkatan Kualitas dan Perbaikan Kampung

2. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH

- a. Program Pemberdayaan dan Penggalangan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Pertamanan dan Pemakaman
- b. Program Peningkatan Ruang Terbuka Hijau Pertanian dan Kehutanan
- c. Program Peningkatan Kuantitas RTH Pertamanan dan Pemakaman
- d. Program Pengelolaan RTH Pertamanan dan Pemakaman

Misi 4 :

1. Isu Pembangunan Budaya Multi-Kultur

- a. Program Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan
- b. Program Pengembangan Promosi dan Informasi Kebudayaan
- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan
- d. Program Peningkatan Pelaku dan Kelembagaan Kebudayaan
- e. Program Pemeliharaan gedung Pemda
- f. Program Penyediaan Informasi Perumahan, Permukiman dan Gedung Pemda
- g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Konflik
- h. Program Pengembangan wawasan kebangsaan
- i. Program Penguatan Hubungan Kelembagaan
- j. Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat
- k. Program Pendidikan Politik Masyarakat
- l. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pemuda

Misi 5 :

1. Isu peningkatan kapasitas aparatur

- a. Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan SDM Aparatur
- b. Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur DKI Jakarta
- d. Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur DKI Jakarta

2. Isu peningkatan pelayanan publik

- a. Program Pengelolaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- b. Program Implementasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik
- c. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
- d. Program Sistem Informasi dan Teknologi Pajak Daerah
- e. Program Peningkatan Kinerja BUMD
- f. Program Pengelolaan dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan
- g. Program Komunikasi, Data dan Informasi Publik
- h. Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan
- i. Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kecamatan
- j. Program Pendidikan dan Pelatihan
- k. Program Pelayanan Penanaman Modal
- l. Program Penataan dan Pengelolaan Ketatalaksanaan Kota/Kabupaten

3. Isu Peningkatan Kualitas Pendidikan

- a. Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun
- b. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan
- c. Program Peningkatan Mutu Pendidikan

4. Isue Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat

- a. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan
- c. Program Keluarga Berencana

B. PERJANJIAN KINERJA

Tabel III.1
Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2017

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
FUNGSI TATA PEMERINTAHAN			
1	Meningkatnya Koordinasi Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan di bidang Tata Pemerintahan dan Aparatur	1 Tersusunnya draft Rancangan UU Revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009	1 Draft Rancangan UU
		2 Tersusunnya dan terlaksananya Implementasi Kebijakan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan	Draft Perda RT/RW
		3 Kesepakatan 3 Bidang Kerjasama dengan daerah perbatasan Jakarta meliputi Baku Mutu Air, Transportasi dan RTH	Perjanjian Kerjasama antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Bodetabekjur, Provinsi Lainnya dan Lembaga/Badan
FUNGSI HUKUM			
1	Meningkatnya jumlah Raperda/Perda dan Rapergub/Pergub yang dievaluasi dan disempurnakan	1 Jumlah Produk Hukum yang diharmonisasi	10 Produk hukum daerah
2	Meningkatnya penyelesaian hukum dan penanganan perkara	1 Jumlah perkara pengadilan yang tertangani	40 Perkara
		2 Jumlah sengketa terselesaikan dan terkoordinasi	250 sengketa
FUNGSI ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI			
1	Meningkatnya penataan SDM yang sesuai dengan kelembagaan yang tepat ukuran dan tepat fungsi	1 Tersusunnya formasi jabatan, kelas jabatan dan nilai jabatan	42 Pergub
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	1 Peningkatan penilaian predikat LKIP	BB
FUNGSI KEPALA DAERAH DAN KERJASAMA LUAR NEGERI			
1	Meningkatnya hubungan, kerjasama dan partisipasi daerah pada event dan organisasi inter-nasional yang efektif dan efisien	1 Jumlah keanggotaan dan partisipasi daerah dalam Organisasi Internasional	11 organisasi internasional
			18 event internasional
2	Meningkatnya kerjasama sister city yang mendukung	1 Jumlah kerjasama Sister City	1 calon sister city
			9 isu

	pelaksanaan 9 program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta			4 kota aktif melaksanakan program
				30 Peserta
				Kunjungan 4 sister city
3	Meningkatnya pelayanan keprotokolan dan administrasi Pimpinan Daerah yang professional dan efisien	1	Terlaksananya Aktifitas Keprotokolan Daerah	1.400 acara
				1.400 agenda
				100% TL Surat Gub/Wagub/ Sekda/Deputi
4	Meningkatnya Produktivitas Aparat		% Rata rata kinerja SDM KDH dan KLN	90%

FUNGSI PEREKONOMIAN

1	Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan membina KUMKM, Industri, Energi dan Perdagangan Usaha, Perhubungan, Pariwisata, Ketenagakerjaan, Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan, Penanaman Modal dan Promosi dan BUMD	1	Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Transportasi di Provinsi DKI Jakarta	Dokumen
		2	Pantauan harga pangan Strategis di Provinsi DKI Jakarta	Dokumen
		3	Monitoring pelaksanaan Perizinan/non Perizinan Bidang Perekonomian pada PTSP di Provinsi DKI Jakarta	Dokumen
		4	Monitoring, Evaluasi dan Perumusan Kebijakan Koperasi dan UMKM di Provinsi DKI Jakarta	Dokumen
		5	Tim Pengendalian Inflasi Daerah	Dokumen

FUNGSI PENATAAN KOTA DAN LINGKUNGAN HIDUP

1	Optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten	1	Terlaksananya koordinasi yang intensif, efektif dan efisien	250 kali pelaksanaan koordinasi
2	Meningkatnya pelaksanaan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dan berketahanan dalam menghadapi resiko bencana dan dampak perubahan iklim	1	Terkumpul dan terolahnya data yang diperlukan dalam perumusan kebijakan	20 dokumen PPK
		2	Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan kegiatan koordinasi	12 laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi

FUNGSI UMUM

1	Meningkatnya kualitas pengelolaan kerumahtanggan dilingkungan kompleks gedung Balaikota	1	Persentase berkurangnya keluhan terhadap pelayanan kebersihan, AC, Air, Lift, dan Lampu Penerangan Kantor	20%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi surat-menyerurat	1	Lama penyelesaian tiket naskah dinas yang ditandatangani Gubernur,	2 hari

			Wakil Gubernur dan Sekda (Kurang dari 40 lembar)	
3	Meningkatnya kualitas keamanan dan ketertiban di lingkungan Balaikota	1	Persentase menurunnya kasus tindak kriminal	20%
4	Meningkatnya produktifitas Aparat Biro Umum	1	Persentase Aparat yang kompeten	90%
FUNGSI ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH				
1	Meningkatnya pelayanan administrasi surat-menyurat dinas Sekretariat Daerah, deputy Gubernur dan Asisten Sekda yang ditandai dengan singkatnya waktu pengurusan, tepatnya sasaran dan efisiensinya biaya yang dikeluarkan	1	Persentase naskah dinas yang ditandatangani tepat waktu	100%
2	Terkelolanya keuangan dan aset Sekretariat Daerah yang tertib dan teratur	1	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu, tepat jumlah dan tepat orang sesuai listing	100%
		2	Indeks Kepuasan layananan Pembayaran Perjalanan Dinas DKPD/UKPD	3.00
3	Terkelolanya aset Sekretariat Daerah dengan tertib dan teratur	1	Persentase data asset yang telah dicacah dan dikelola	800 data asset
FUNGSI KESEJAHTERAAN SOSIAL				
1	Tersusunnya Kebijakan kesehatan, social dan Pemberdayaan	1	Jumlah kebijakan kesehatan, sosial dan pemberdayaan yang tersusun	5 rancangan kebijakan
2	Terkoordinasi, Termonitor dan Terevaluasinya Pelaksanaan kebijakan Kesehatan, social dan PEMBERDAYAAN	1	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan	7 Dokumen laporan
FUNGSI PENDIDIKAN MENTAL DAN SPIRITUAL				
1	Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan pendidikan, keolahragaan, kepemudaan, perpustakaan daerah dan kearsipan daerah serta mental spiritual	1	Jumlah kebijakan pendidikan, olahraga dan pemuda, perpustakaan dan kearsipan serta mental spiritual yang disusun	21 bahan kebijakan
2	Terkoordinasinya, termonitor dan terevaluasinya kebijakan penyelenggaraan pendidikan, keolahragaan, kepemudaan, perpustakaan daerah dan	1	Jumlah koordinasi pendidikan, olahraga dan pemuda, perpustakaan dan kearsipan serta mental spiritual yang dilakukan	9 dokumen

	kearsipan daerah serta mental spiritual			
3	Terlayannya Jemaah haji Provinsi DKI Jakarta dengan baik	1	Persentase Jemaah haji yang mendapatkan tambahan layanan dan Pembinaan ibadah haji	100%

Adapun jumlah untuk jumlah APBD masing-masing fungsi terlampir pada Perjanjian Kinerja masing-masing Biro Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016.



BAB III

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH

Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam mengukur capaian kinerja. Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 yaitu dengan cara membandingkan Antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada masing-masing Biro-Biro Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017.

Adapun tingkat capaian kinerja Biro-Biro Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

**Tabel III.1
Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2017**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
FUNGSI TATA PEMERINTAHAN					
1	Meningkatnya Koordinasi Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan di bidang Tata Pemerintahan dan Aparatur	1 Tersusunnya draft Rancangan UU Revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009	1 Draft Rancangan UU	1 Draft Rancangan UU	100%
		2 Tersusunnya dan terlaksananya Implementasi Kebijakan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan	Draft Perda RT/RW	1 NA 1 Draft Perda RT/RW	100%
		3 Kesepakatan 3 Bidang Kerjasama dengan daerah perbatasan Jakarta meliputi Baku Mutu Air, Transportasi dan RTH	Perjanjian Kerjasama antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Bodejabekjur, Provinsi Lainnya dan Lembaga/Badan	29 KB Provinsi/ Kota Perbatasan dan Lembaga/Badan 78 PKS dengan Provinsi/ Kabupaten Lain, Provinsi/ Kota Perbatasan dan Lembaga/Badan	243%
FUNGSI HUKUM					
1	Meningkatnya jumlah Raperda/Perda dan Rapergub/Pergub yang dievaluasi dan disempurnakan	1 Jumlah Produk Hukum yang diharmonisasi	10 Produk hukum daerah	13 Produk hukum daerah	130%
2	Meningkatnya penyelesaian hukum dan penanganan perkara	1 Jumlah perkara pengadilan yang tertangani	40 Perkara	65 Perkara	162.5%
		2 Jumlah sengketa terselesaikan dan terkoordinasi	250 sengketa	177 sengketa	70.08%



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
FUNGSI ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI					
1	Meningkatnya penataan SDM yang sesuai dengan kelembagaan yang tepat ukuran dan tepat fungsi	1 Tersusunnya formasi jabatan, kelas jabatan dan nilai jabatan	42 Pergub	42 Pergub	100
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	1 Peningkatan penilaian predikat LKIP	BB	B	92,91%
FUNGSI KEPALA DAERAH DAN KERJASAMA LUAR NEGERI					
1	Meningkatnya hubungan, kerjasama dan partisipasi daerah pada event dan organisasi inter-nasional yang efektif dan efisien	1 Jumlah keanggotaan dan partisipasi daerah dalam Organisasi Internasional	11 organisasi internasional	20 Organisasi internasional	182%
			18 event internasional	23 event internasional	128%
2	Meningkatnya kerjasama sister city yang mendukung pelaksanaan 9 program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	1 Jumlah kerjasama Sister City	1 calon sister city	3 calon sister city	300%
			9 isu	9 isu	100%
			4 kota aktif melaksanakan program	13 kota aktif melaksanakan program	325%
			Kunjungan 4 sister city	Kunjungan 5 Sister City	125%
3	Meningkatnya pelayanan keprotokolan dan administrasi Pimpinan Daerah yang professional dan efisien	1 Terlaksananya Aktifitas Keprotokolan Daerah	1.400 acara	2.370 acara	169%
			1.400 agenda	2.187 Agenda	156%
			100% TL Surat Gub/Wagub/ Sekda/Deputi	100% TL Surat Gub/ Wagub/Sekda/Deputi	100%
4	Meningkatnya Produktivitas Aparat	1 % Rata rata kinerja SDM KDH dan KLN	90%	98,66%	110%
FUNGSI PEREKONOMIAN					
1	Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan, mengkoordinasikan,	1 Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Transportasi di Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen	1 Dokumen	100%



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	
	memantau, mengevaluasi dan membina KUMKM, Industri, Energi dan Perdagangan Usaha, Perhubungan, Pariwisata, Ketenagakerjaan, Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan, Penanaman Modal dan Promosi dan BUMD	2	Pantauan harga pangan Strategis di Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		3	Monitoring pelaksanaan Perizinan/non Perizinan Bidang Perekonomian pada PTSP di Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		4	Monitoring, Evaluasi dan Perumusan Kebijakan Koperasi dan UMKM di Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		5	Tim Pengendalian Inflasi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
FUNGSI PENATAAN KOTA DAN LINGKUNGAN HIDUP						
1	Optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten	1	Terlaksananya koordinasi yang intensif, efektif dan efisien	250 kali pelaksanaan koordinasi	464 Kali Pelaksanaan Koordinasi	185,6%
2	Meningkatnya pelaksanaan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dan berketahanan dalam menghadapi resiko bencana dan dampak perubahan iklim	1	Terkumpul dan terolahnya data yang diperlukan dalam perumusan kebijakan	20 dokumen PPK	26 Dokumen PPK	130%
		2	Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan kegiatan koordinasi	12 laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi	52 Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi	433,3%
FUNGSI UMUM						
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan kerumahtanggaan dilingkungan kompleks gedung Balaikota	1	Persentase berkurangnya keluhan terhadap pelayanan kebersihan, AC, Air, Lift, dan Lampu Penerangan Kantor	20%	20 %	100 %
2	Meningkatnya kualitas	1	Lama penyelesaian tiknet	2 hari	2 hari	100 %



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	
	pelayanan administrasi surat-menyurat		naskah dinas yang ditandatangani Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda (Kurang dari 40 lembar)			
3	Meningkatnya kualitas keamanan dan ketertiban di lingkungan Balaikota	1	Persentase menurunnya kasus tindak kriminal	20%	20 %	100 %
4	Meningkatnya produktifitas Aparat Biro Umum	1	Persentase Aparat yang kompeten	90%	90 %	100 %

FUNGSI ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH

1	Meningkatnya pelayanan administrasi surat-menyurat dinas Sekretariat Daerah, deputi Gubernur dan Asisten Sekda yang ditandai dengan singkatnya waktu pengurusan, tepatnya sasaran dan efisiensinya biaya yang dikeluarkan	1	Persentase naskah dinas yang ditandatangani tepat waktu	100%	100%	100%
2	Terkelolanya keuangan dan aset Sekretariat Daerah yang tertib dan teratur	1	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu, tepat jumlah dan tepat orang sesuai listing	100%	100%	100%
		2	Indeks Kepuasan layananan Pembayaran Perjalanan Dinas DKPD/UKPD	3.00	3.00	100%
3	Terkelolanya asset Sekretariat Daerah	4	Persentase data asset yang telah dicacah dan dikelola	800 data asset	800 data asset	100%



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
	dengan tertib dan teratur				
FUNGSI KESEJAHTERAAN SOSIAL					
1	Tersusunnya Kebijakan kesehatan, social dan Pemberdayaan	1 Jumlah kebijakan kesehatan, sosial dan pemberdayaan yang tersusun	5 rancangan kebijakan	15 kebijakan	300%
2	Terkoordinasi, Termonitor dan Terevaluasinya Pelaksanaan kebijakan Kesehatan, social dan PEmberdayaan	1 Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan	7 Dokumen laporan	8 dokumen	114,29%
FUNGSI PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL					
1	Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan pendidikan, keolahragaan, kepemudaan, perpustakaan daerah dan kearsipan daerah serta mental spiritual	1 Jumlah kebijakan pendidikan, olahraga dan pemuda, perpustakaan dan kearsipan serta mental spiritual yang disusun	21 bahan kebijakan	27 Kebijakan	128,6%
2	Terkoordinasinya, termonitor dan terevaluasinya kebijakan penyelenggaraan pendidikan, keolahragaan, kepemudaan, perpustakaan daerah dan kearsipan daerah serta mental spiritual	1 Jumlah koordinasi pendidikan, olahraga dan pemuda, perpustakaan dan kearsipan serta mental spiritual yang dilakukan	9 dokumen	9 dokumen	100%
3	Terlayannya Jemaah haji	1 Persentase Jemaah haji yang	100%	100%	100%



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
	Provinsi DKI Jakarta dengan baik	mendapatkan tambahan layanan dan Pembinaan ibadah haji			



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja yang dapat digunakan sebagai informasi yang transparan mengenai sebab tercapai maupun tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan. Adapun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara bertahap dan konsisten telah berupaya untuk mewujudkan misi dan tujuannya melalui 24 (dua puluh empat) sasaran strategis dan 33 (tiga puluh tiga) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam maupun IKU (Indikator Kinerja Utama) dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Adapun narasi pada masing-masing Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Biro Tata Pemerintahan

Biro Tata Pemerintahan mempunyai 1 (satu) Sasaran Strategis pada tahun 2017 yang terdiri dari :

Meningkatnya Koordinasi Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan di bidang Tata Pemerintahan dan Aparatur

Sasaran strategis tersebut mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja yaitu

- a. Tersusunnya draft Rancangan UU Revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, indikator tersebut mempunyai 1 (satu) target yang harus dicapai, yaitu: 1 Draft Rancangan UU

Untuk mencapai indikator tersebut Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta Tata Pemerintahan mempunyai Program, yaitu Program Koordinasi Kebijakan Tata Pemerintahan Daerah, dengan 1 (satu) kegiatan Penyusunan Raperda/Pergub/Kepgub/Regulasi lainnya terkait kebijakan SKPD di bawah koordinasi Biro Tata Pemerintahan.

Capaian dari kegiatan ini 1 (satu) Draft Rancangan UU (Hasil Pembahasan dan Penyempurnaan RUU) atau sebesar 100%.

- b. Tersusunnya dan Terlaksananya Implementasi Kebijakan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan, indikator ini mempunyai 1 (satu) target yang harus dicapai, yaitu 1 (satu) Draft Perda RT/RW.

Untuk mencapai indikator ini Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta Tata Pemerintahan menggunakan program dan kegiatan yang sama



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

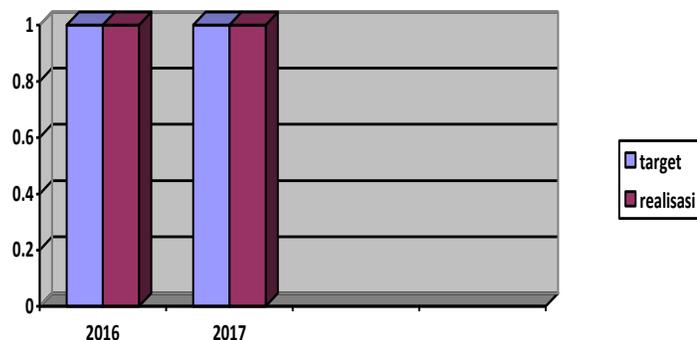
dengan program dan kegiatan untuk mencapai indikator pada huruf a, yaitu Program Koordinasi Kebijakan Tata Pemerintahan Daerah, dengan kegiatan Penyusunan Raperda/Pergub/Kepgub/Regulasi lainnya terkait kebijakan SKPD di bawah koordinasi Biro Tata Pemerintahan.

Capaian dari kegiatan ini 1 (satu) Naskah Akademik dan 1 (satu) Draft Perda RT/RW atau sebesar 100%.

Untuk mencapai target kedua indikator pada kegiatan Penyusunan Raperda/Pergub/Kepgub/Regulasi lainnya terkait kebijakan SKPD di bawah koordinasi Biro Tata Pemerintahan telah ditetapkan pagu anggaran sebesar Rp802.375.000,00, dan terserap sebesar Rp551.337.400,00 atau 68,71%, adapun penyebab tidak maksimalnya penyerapan anggaran karena

- 1) Pelaksanaan pembahasan RUU dengan Kementerian Sektoral menyesuaikan dengan dinamika Kemendagri;
- 2) Harmonisasi RUU dengan Kemenkumham belum terlaksana, karena Panitia Antar Kementerian (PAK) bentukan Kemendagri belum selesai
- 3) Anggaran yang tidak terserap pada Honorarium PNS yang semula dialokasikan untuk proses harmonisasi UU dengan Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Sektoral lainnya, mengingat PAK belum terbentuk, maka harmonisasi UU dengan Kemenkumham tidak dapat dilaksanakan.

Berikut perbandingan presentase capaian program Koordinasi Kebijakan Tata Pemerintahan Daerah Tahun 2016 – 2017



Grafik III.1

Grafik Perbandingan koordinasi Kebijakan Biro Tata Pemerintahan



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

- c. Kesepakatan 3 Bidang Kerjasama dengan daerah perbatasan Jakarta meliputi Baku Mutu Air, Transportasi dan RTH, indikator ini mempunyai target yang harus dicapai, yaitu 8 KB dan 36 PKS antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Bodetabekjur, Provinsi Lainnya dan Lembaga/Badan.

Untuk mencapai indikator tersebut Biro Tata Pemerintahan mempunyai program Peningkatan Kerjasama Antardaerah dan Luar Negeri, dengan 2 (dua) kegiatan, yaitu:

- 1) Pelaksanaan Teknis Penyusunan Naskah Kerja Sama dengan Provinsi/Kabupaten;
- 2) Pelaksanaan Teknis Penyusunan Kerjasama Perkotaan dan Lembaga/Badan

Capaian dari masing-masing kegiatan tersebut untuk target

- 1) 1 Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Kabupaten Bangka Barat;
- 2) 29 Kesepakatan Bersama (6 KB dengan Pemda Provinsi/Kab/Kota Perbatasan dan 23 KB dengan Pihak Ketiga/Lembaga/Badan) dan 77 Perjanjian Kerja Sama (1 PKS dengan Provinsi/Kota Perbatasan dan 76 PKS dengan Pihak Ketiga atau Lembaga/Badan).

atau sebesar 243 persen dari target 44 KB/PKS yang ditetapkan.

Untuk mencapai target indikator Program Peningkatan Kerjasama Antardaerah dan Luar Negeri pada kedua kegiatan tersebut telah ditetapkan pagu anggaran sebesar Rp208.395.700,00, dan terserap sebesar Rp176.100.500,00 atau 84,50%, adapun penyebab tidak maksimalnya penyerapan anggaran karena:

- 1) Didalam kegiatan ini anggaran terbesarnya adalah belanja makan dan minum rapat yang sifatnya bahan pendukung kegiatan fasilitasi penyusunan Naskah Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten di berbagai bidang, salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan pangan di Provisinis DKI Jakarta. Penyerapan anggaran tidak hanya keaktifan dari pelaksana tetapi juga dipengaruhi oleh ada tidak



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

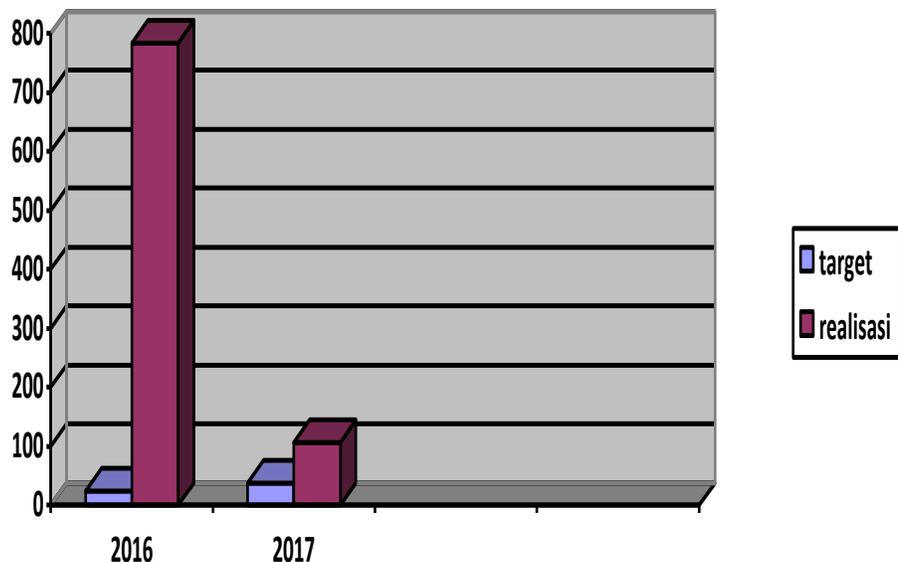
usulan kerja sama yang diajukan oleh Provinsi dan Kabupaten lain, sehingga anggaran hanya terserap sebesar 39,67%;

- 3) Sedangkan untuk anggaran kegiatan Pelaksanaan Teknis Penyusunan Kerjasama Perkotaan dan Lembaga/Badan telah terserap secara maksimal sebesar 98,89%.

Berikut perbandingan presentase capaian program Peningkatan Kerjasama Antardaerah dan Luar Negeri Tahun 2016 – 2017.

Grafik III.2

Grafik Perbandingan Peningkatan Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri Tahun 2016 dan 2017



Tabel III.3

Tabel Keseluruhan Capaian Biro Tata Pemerintahan

No	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Penyusunan Raperda/Pergub/Kepgub/Regulasi lainnya terkait kebijakan SKPD di bawah koordinasi Biro Tata Pemerintahan	- 1 draft Rancangan UU	- 1 Draft Rancangan UU	100%
		- 1 (satu) Draft Perda RT/RW	- 1 NA - 1 draft Perda RT/ RW	100%
2	Pelaksanaan Teknis Penyusunan Naskah	- 8 KB - 36 PKS	- 29 KB - 78 PKS	243%



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

No	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
3	Kerja Sama dengan Provinsi/Kabupaten Pelaksanaan Teknis Penyusunan Kerjasama Perkotaan dan Lembaga/Badan	dengan Provinsi/ Kabupaten, Provinsi/Kab/ Kota Bodetabekjur dan Lembaga/Bada n	dengan Provinsi/ Kabupaten, Provinsi/Kab b/ Kota Bodetabekj ur dan Lembaga/ Badan	

2. Biro Hukum

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Setda Provinsi DKI Jakarta sebagai instansi di lingkungan Pemerintah Daerah telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 4 (empat) tahun, yaitu untuk tahun 2013-2017 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran.

Biro Hukum menetapkan sasaran strategis yang ingin dicapai sebagai berikut :

- a. Meningkatnya jumlah Ranperda/perda dan Rapergub/pergub yang dievaluasi dan disempurnakan.

Di tahun 2017 Terdapat 13 produk hokum daerah yang berhasil dievaluasi dan disempurnakan. Hal itu menyebabkan adanya kenaikan sebesar 30 % dari penetapan kinerja 2017 yang menargetkan sebanyak 10 produk hukum daerah.

Tabel III.4

Tabel Capaian Jumlah Produk Hukum yang diharmonisasi dari Tahun 2015-2017

No.	Rencana Strategis	Target	2015	2016	2017
1.	Jumlah produk Hukum yang di harmonisasi	10	10	10	13



b. Meningkatnya penyelesaian hukum dan penanganan perkara.

Permasalahan hukum di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terbagi dalam dua bentuk penyelesaian yaitu diselesaikan dalam pengadilan dan penyelesaian dalam bentuk koordinasi.

1. Peningkatan Penyelesaian dalam pengadilan

Tabel III.5
Tabel Peningkatan Penyelesaian dalam Peradilan Tahun 2015-2017

No.	Rencana Strategis	Target	2015	2016	2017
1.	Jumlah Perkara pengadilan yang tertangani	40	> 40	> 40	65

Meningkatnya angka perkara yang ditangani di tahun 2017 disebabkan adanya peningkatan gugatan yang masuk ke pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Peningkatan Penyelesaian dalam koordinasi

Tabel III.6
Jumlah Sengketa terselesaikan dari Tahun 2015-2017

No.	Rencana Strategis	Target	2015	2016	2017
1.	Jumlah Sengketa terselesaikan dan terkoordinasi	250	> 250	> 250	177

Menurunnya angka perkara yang ditangani di tahun 2017 adalah karena jumlah sengketa yang masuk ke Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2017 hanya sebesar 177 surat pengaduan.

3. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Peraturan Gubernur Nomor 250 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat, Biro Organisasi dan Reformasi



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta merupakan unsur penunjang Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang dipimpin oleh Kepala Biro dengan Eselon II b yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Asisten Pemerintahan.

Biro Organisasi memiliki 2 (dua) sasaran strategis yang ingin dicapai di Tahun 2017 yakni :

- a. Meningkatnya penataan SDM yang sesuai dengan kelembagaan yang tepat ukuran dan tepat fungsi

Pada tahun 2017 Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi telah membuat 42 Pergub dari Target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja yakni 42 Pergub sehingga sasaran strategi tersebut mencapai 100%.

- b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD

Untuk mencapai indicator pada sasaran tersebut diatas yakni Peningkatan penilaian predikat LKIP, pada Tahun 2016 nilai LKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yakni B dengan nilai 65,05 dari target BB sehingga capaian yang dicapai 92,91% dengan perhitungan $65,05 \text{ per } 70,01 \text{ (nilai BB)} \text{ kali } 100\%$. Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta TA 2016, Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi memiliki jumlah anggaran 12.977.500 dan realisasi 11.020.000.

Tabel III.7
Tabel Perbandingan Nilai LKIP Tahun 2015-2016

Tahun	Target	Nilai
2015	B	CC
2016	BB	B



Program Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan pada Tahun 2017 ada 3 (tiga) dengan rincian sebagai berikut :

1. Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan SDM Aparatur;
2. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
3. Peningkatan dan Pengelolaan kantor urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah kepegawaian dan persandian.

Dalam menjalankan program-program yang telah ditetapkan pada Tahun 2017 Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta membuat suatu perencanaan kinerja yang dituangkan dalam 3 (tiga) Program dan 17 (tujuh belas) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 565.896.312,-(lima ratus enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua belas rupiah).

4. Biro Kerjasama Daerah dan Kerjasama Luar Negeri

Pada Tahun 2017, Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri memiliki 3 Sasaran Strategis yang terdiri dari :

- a. Meningkatnya hubungan, kerjasama dan partisipasi daerah pada event dan organisasi internasional yang efektif dan efisien. Sasaran strategis tersebut memiliki indikator kinerja yaitu Jumlah Keanggotaan dan partisipasi daerah dalam Organisasi Internasional, indikator tersebut memiliki 2 (dua) target yang harus dicapai yaitu :
 - 1) 11 organisasi internasional; dan
 - 2) 18 event internasional.

Untuk mencapai indikator tersebut Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri melaksanakan 4 (empat) kegiatan Program Peningkatan Kerjasama antar Daerah dan Luar Negeri yaitu :

- a. Penyediaan Iuran Keanggotaan Pemprov DKI Jakarta pada Organisasi Internasional



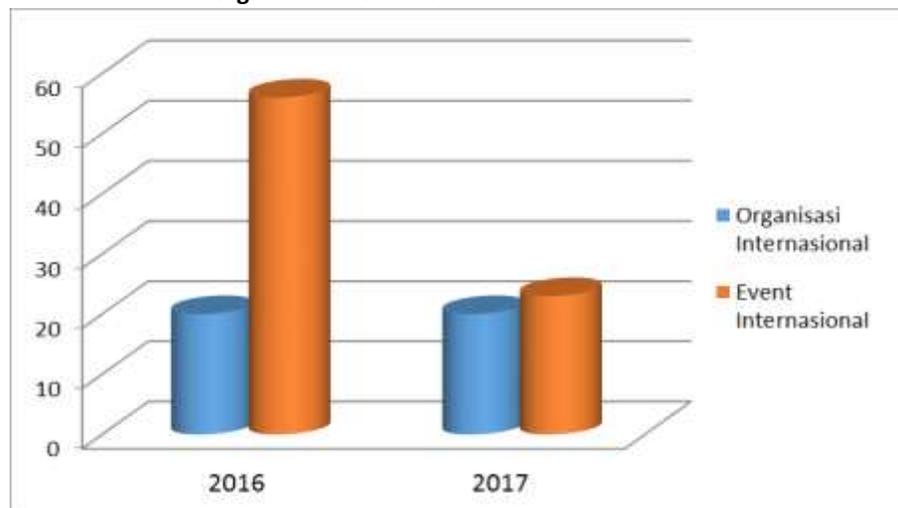
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

- b. Peningkatan Partisipasi Jakarta pada Event dan Organisasi Internasional
- c. Penyelenggaraan Corps Diplomatic Gathering
- d. Peningkatan Pelayanan Korps Diplomatik

Sedangkan realisasi dari indikator kinerja jumlah keanggotaan dan partisipasi daerah dalam organisasi internasional yaitu sebesar 20 organisasi internasional dari target 11 organisasi internasional (182 %) dan 23 event internasional dari target 18 event internasional (128%).

Berikut perbandingan presentase capaian indikator kinerja yaitu Jumlah Keanggotaan dan partisipasi daerah dalam Organisasi Internasional Tahun 2016 – 2017.

Grafik III.3
Grafik Jumlah Keanggotaan dan partisipasi daerah dan organisasi internasional Tahun 2016-2017



- b. Meningkatnya kerjasama sister city yang mendukung pelaksanaan 9 program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sasaran strategis tersebut memiliki indikator kinerja yaitu Jumlah Kerjasama *Sister City*, indikator tersebut memiliki 5 (lima) target yang harus dicapai yaitu :
 - 1) 1 Calon *sister city*
 - 2) 9 Isu
 - 3) 4 Kota Aktif melaksanakan program
 - 4) Kunjungan 4 *sister city*



5) 30 peserta Jakarta International Youth Program

Untuk mencapai indikator tersebut Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri melaksanakan 2 (dua) kegiatan Program Peningkatan Kerjasama antar Daerah dan Luar Negeri yaitu:

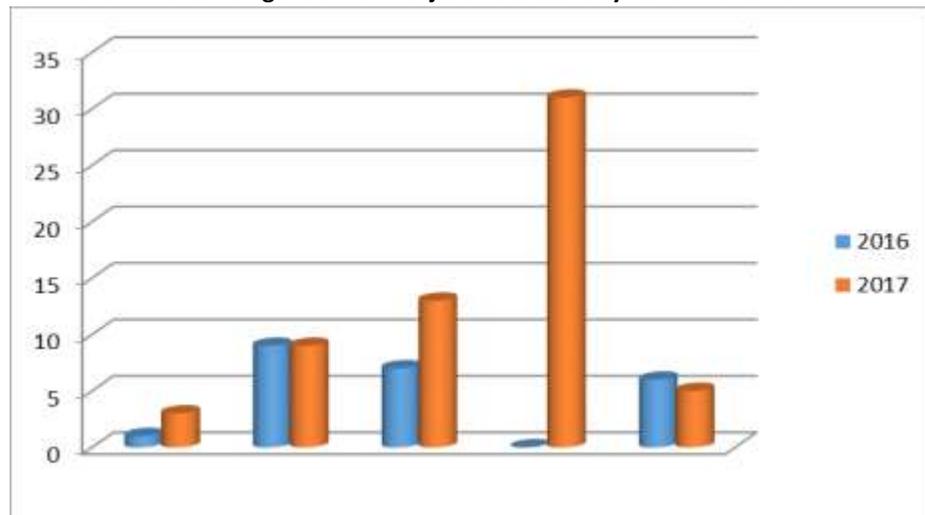
- a. Pengembangan hubungan kerjasama *sister city*
- b. Penyelenggaraan Jakarta International Youth Program

Sedangkan realisasi dari indikator kinerja Jumlah Kerjasama *Sister City* yaitu sebesar 3 calon *sister city* dari target 1 calon *sister city* (300 %), 9 isu dari target 9 isu kerjasama *sister city* (100%), 13 kota aktif melaksanakan program dari target 3 kota aktif melaksanakan program (325%), 31 peserta dari target 30 peserta Jakarta International Youth Program dan Kunjungan 5 *sister city* dari target kunjungan 4 *sister city* (125%)

Berikut perbandingan presentase capaian Jumlah Kerjasama *Sister City* Tahun 2016 – 2017.

Grafik III.4

Grafik Perbandingan Jumlah Kerjasama *Sister City* Tahun 2016-2017



- c. Meningkatnya pelayanan keprotokolan dan administrasi Pimpinan Daerah yang professional dan efisien. Sasaran strategis tersebut memiliki indikator kinerja yaitu terlaksananya aktifitas keprotokolan daerah, indikator tersebut memiliki 3 (tiga) target yang harus dicapai yaitu :
 - 1) Terlaksananya 1.300 acara
 - 2) Terlaksananya 1.300 agenda
- d. 100% TL Surat Gub/Wagub/Sekda/Deputi



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

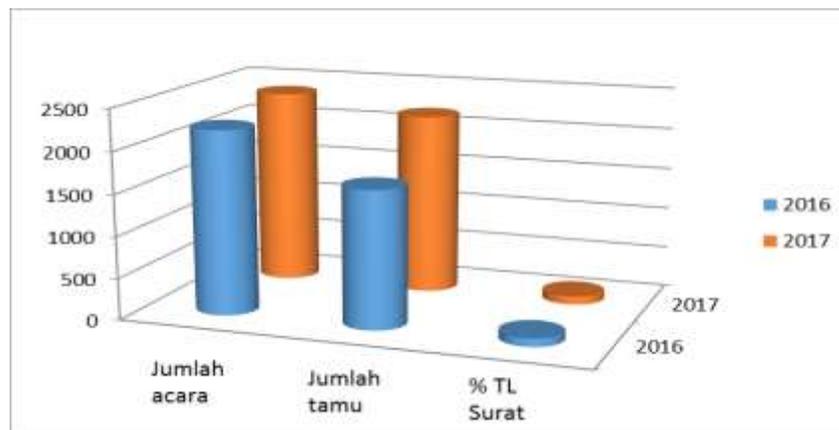
Untuk mencapai indikator tersebut Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri melaksanakan Program Keprotokolan dan administrasi pimpinan daerah dengan 9 (sembilan) kegiatan yaitu:

- a. Pelaksanaan acara pimpinan daerah
- b. Penyelenggaraan jamuan resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- c. Penatausahaan Acara Pimpinan Daerah
- d. Pelaksanaan Upacara Bendera Tingkat Provinsi DKI Jakarta
- e. Penganjangan dan Malam Resepsi HUT Kota Jakarta
- f. Pelaksanaan penerimaan/pelayanan tamu pimpinan daerah
- g. Pengelolaan administrasi dan kerumahtanggaan pimpinan daerah
- h. Penyusunan naskah sambutan, makalah dan kertas kerja
- i. Penyediaan sarana, prasarana dan perlengkapan kebutuhan pimpinan daerah.

Sedangkan realisasi dari indikator kinerja terlaksananya aktifitas keprotokolan daerah yaitu 2.370 acara dari target 1.400 acara resmi Pemprov DKI Jakarta (169%), 2.187 agenda dari target 1.400 agenda pelayanan tamu resmi Pemprov DKI Jakarta, dan 100% TL Surat Gub/Wagub/ Sekda/Deputi dari target 100% TL Surat Gub/Wagub/ Sekda/Deputi

Berikut perbandingan presentase capaian tahun 2016 – 2017.

Grafik III.5 Persentase Capaian Biro KDH Tahun 2016-2017





e. Meningkatnya produktivitas aparat. Sasaran strategis tersebut memiliki indikator kinerja yaitu % Rata-rata Kinerja SDM Biro KDH dan KLN, indikator tersebut memiliki target yang harus dicapai yaitu 90% Rata-rata Kinerja SDM Biro KDH dan KLN

Sedangkan realisasi dari indikator kinerja tersebut yaitu sebesar 98,66% Rata-rata Kinerja SDM Biro KDH dan KLN dari target sebesar 90% Rata-rata Kinerja SDM Biro KDH dan KLN

5. Biro Perekonomian

Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017 mempunyai 1 Sasaran Strategis yaitu meningkatnya kualitas perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan membina KUMKM, Industri, Energi dan Perdagangan Usaha, Perhubungan, Pariwisata, Ketenagakerjaan, Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan, Penanaman Modal dan Promosi dan BUMD. Sasaran strategis tersebut mempunyai 5 indikator kinerja, antara lain:

- 1) Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Transportasi di Provinsi DKI Jakarta;
- 2) Pemantauan harga pangan Strategis di Provinsi DKI Jakarta;
- 3) Monitoring pelaksanaan Perizinan/non Perizinan Bidang Perekonomian pada PTSP di Provinsi DKI Jakarta;
- 4) Monitoring, Evaluasi dan Perumusan Kebijakan Koperasi dan UMKM di Provinsi DKI Jakarta; dan
- 5) Tim Pengendalian Inflasi Daerah.

Seluruh indikator kinerja diatas merupakan kegiatan yang terdapat dalam Program Koordinasi Kebijakan Perekonomian. Target dari masing-masing indikator kinerja tersebut adalah 1 dokumen, dengan hasil capaian tahun 2017 sebesar 100% yaitu total 5 dokumen.



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Perbandingan dengan Capaian Tahun 2016 Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016 mempunyai 1 Sasaran Strategis yaitu berkembangnya aktivitas ekonomi perdagangan dan jasa pada pusat kegiatan primer dan sekunder terutama yang ditetapkan dalam RTRW. Sasaran strategis tersebut mempunyai 5 indikator kinerja, antara lain:

- 1) Jumlah Kajian Ketahanan Pangan;
- 2) Jumlah Laporan Koordinasi Penataan PKL;
- 3) Jumlah Kajian Transportasi;
- 4) Jumlah Kajian Ekonomi Makro/Mikro; dan
- 5) Jumlah Laporan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perijinan dan Non Perijinan Bidang Perekonomian di Provinsi DKI Jakarta.

Seluruh indikator kinerja diatas merupakan kegiatan yang terdapat dalam Program Koordinasi Kebijakan Perekonomian. Target dari masing-masing indikator kinerja tersebut adalah 1 dokumen, dengan hasil capaian tahun 2016 sebesar 100% yaitu total 5 dokumen.

Grafik III.6
Perbandingan Target dan Capaian Indikator Tahun 2016 dan 2017



6. Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup

Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup mempunyai 2 Sasaran Strategis pada tahun 2017 yang terdiri dari :

- a. Optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten, sasaran ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja utama, yaitu



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

- 1) Terlaksananya koordinasi yang intensif, efektif dan efisien. Target yang harus dicapai dalam indikator kinerja utama ini adalah 250 kali pelaksanaan koordinasi.

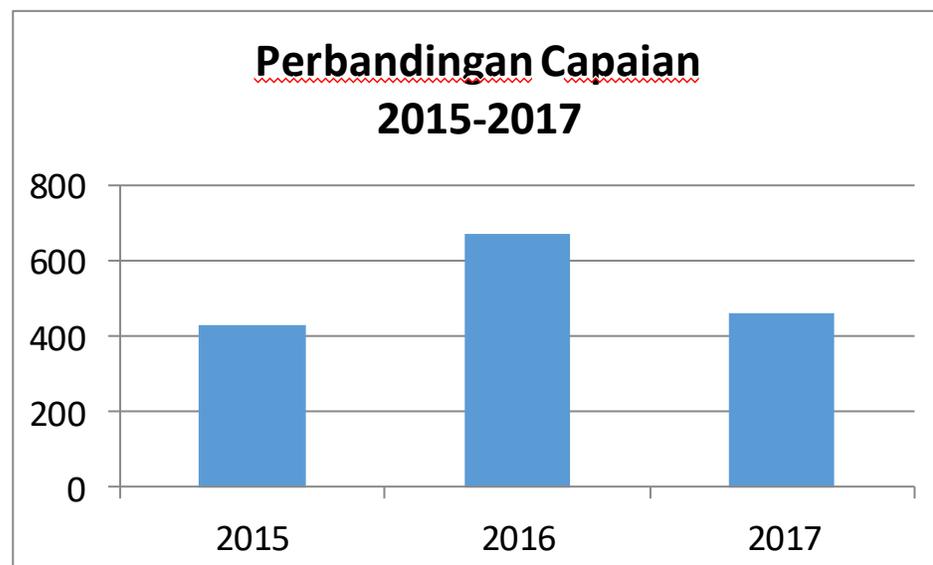
Pelaksanaan koordinasi ini merupakan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Biro dalam melaksanakan penyusunan kebijakan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, pertamanan dan pemakaman, pemantauan fasilitas sosial dan fasilitas umum serta pengendalian penyelesaian kewajiban.

Capaian untuk tahun 2017 adalah sebanyak 464 pelaksanaan koordinasi. Berikut perbandingan capaian pelaksanaan koordinasi tahun 2015 – 2017.

Tabel III.8
Perbandingan Capaian Pelaksanaan Koordinasi Tahun 2015-2017

NO	INDIKATOR	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terlaksananya koordinasi yang intensif, efektif dan efisien	2015	600	430	71,67%
		2016	300	674	100%
		2017	250	464	100%

Grafik III.7
Perbandingan Capaian Tahun 2015-2017 Biro PKLH





PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

- b. Meningkatnya pelaksanaan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dan berketahanan dalam menghadapi resiko bencana dan dampak perubahan iklim. Sasaran ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja utama, yaitu:

1)Terkumpul dan terolahnya data yang diperlukan dalam perumusan kebijakan. Target yang harus dicapai dalam indikator kinerja utama ini adalah 20 dokumen Perjanjian Pemenuhan Kewajiban (PPK). PPK adalah Perjanjian antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemegang Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) atau yang dahulu dikenal dengan Surat Izin Prinsip Penunjukan Tanah (SIPPT). Capaian untuk tahun 2017 adalah sebanyak 20 dokumen PPK. Berikut perbandingan capaian pelaksanaan koordinasi tahun 2015 – 2017.

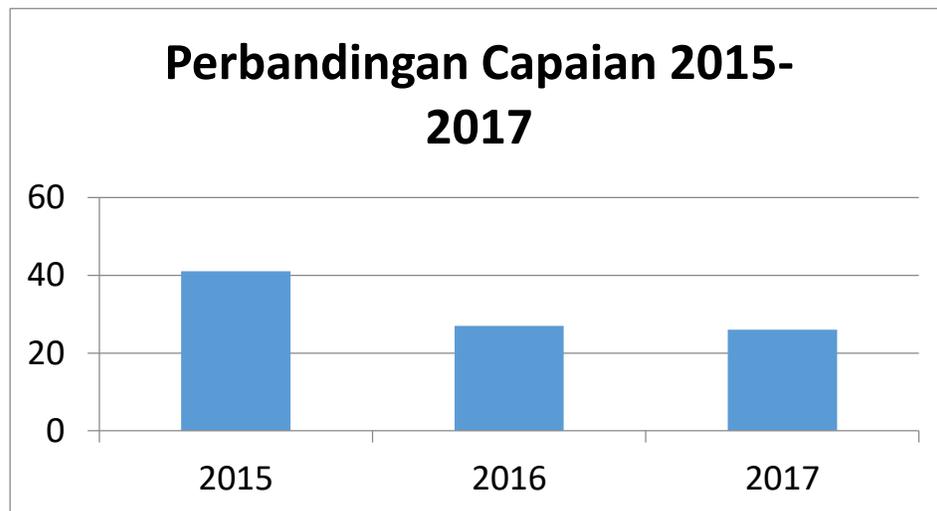
Tabel III.9

Perbandingan Capaian Terkumpul dan terolahnya data yang diperlukan dalam perumusan kebijakan Tahun 2015-2017 Biro PKLH

NO	INDIKATOR	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terkumpul dan terolahnya data yang diperlukan dalam perumusan kebijakan	2015	20 PPK dan 20 Keputusan Gubernur	41 PPK dan 219 SK Penetapan Lokasi	100%
		2016	20 PPK	27	100%
		2017	20 PPK	26	100%

Grafik III.8

Grafik Perbandingan Capaian Biro PKLH Tahun 2015-2017





PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

2) Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan kegiatan koordinasi. Target yang harus dicapai dalam indikator kinerja utama ini adalah 13 Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi merupakan laporan yang disusun setiap triwulan, terhadap pelaksanaan koordinasi yang telah dilakukan selama tahun berjalan.

Pada tahun 2015

Berikut perbandingan presentase capaian tahun 2015 – 2017.

Tabel III.10

Tabel Perbandingan Persentase Capaian Tahun 2015-2017 Biro PKLH

NO	INDIKATOR	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	Terkumpul dan terolahnya data yang diperlukan dalam perumusan kebijakan	2015	15 Laporan	9 Laporan	60%	
		2016	16 Laporan	64 Laporan	100%	
		2017	13 Laporan	52 Laporan	100%	

Grafik III.9

Perbandingan Capaian Tahun 2015-2017





PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Terdapat efisiensi sebesar Rp80.830.256 atau sebesar 9,44%. Efisiensi tersebut berasal dari kegiatan-kegiatan pada Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian. dan Persandian yang terdiri dari kegiatan-kegiatan penunjang operasional Biro.

7. Biro Umum

Terkait sasaran kinerja pada Sekretariat Daerah, Biro Umum mempunyai program untuk mencapai capaian pada masing-masing indikator yaitu dengan program administrasi umum dan Kerumahtanggaan dan program peningkatan dan pengelolaan kantor urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 39.747.435.330,- dan terealisasi sebesar Rp. 33.607.179.373,- atau 84,55 % yang terbagi dalam beberapa sasaran yang terdiri dari :

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan kerumahtanggaan dilingkungan kompleks gedung Balaikota.Tercapainya pemeliharaan dan perawatan, agar selalu dipertahankan dayaguna/hasil guna semaksimal mungkin
2. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi surat menyurat penyelesaian naskah dinas dan atau produk ketatausahaan secara cepat, tepat, akurat dan efisien
3. Meningkatnya kualitas keamanan dan ketertiban di lingkungan Balaikota.Terpeliharanya keamanan, ketertiban dan berfungsinya gedung atau aset di lingkungan Rumah Dinas
4. Meningkatnya produktifitas Aparat Biro Umum. Terlaksananya diklat personil sesuai bidang tugasnya dan penambahan personil yang sesuai kebutuhan dengan latar belakang keahlian sebagai pengganti yang pensiun dan sebagai penambahan personil pada Subbagian atau Bagian yang membutuhkan, terutama tenaga teknis.

Dari realisasi kegiatan tersebut ada penyerapan yang dibawah 50% diantaranya kegiatan sebagai berikut :



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

1. Pembuangan limbah khusus gedung kompleks balaikota penyerapan dengan prosentasi 40,19% dikarenakan harga komponen pada sistem apbd.jakarta.go.id lebih tinggi dari harga pasar dan kami sudah mengajukan usul komponen baru di 2018.
2. Penyediaan alat tulis kantor penyerapan dengan prosentase 6,99% dengan alasan tidak terserapnya anggaran dikarenakan pihak pemenang lelang (CV. Widya Pustaka Jaya) mengalami hambatan supply barang drai principal dan distributor (sesuai surat no. 08/SP-WPJ/XI/2017
3. Pengadaan perlengkapan kerja petugas penyerapan dengan prosentase 21,83% alasan tidak terserap dikarenakan adanya komponen mirror detector dari Subbag Pengamanan yang tidak jadi diadakan karena komponen tersebut merupakan komponen pengganti dan tidak sesuai kebutuhan lapangan. Komponen yang asli ditolak pengajuannya oleh BPAD sehingga tidak bisa diadakan.
4. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas (sipil dan Arsitektur) penyerapan dengan prosentase 48,88% dengan alasan tidak terserapnya anggaran dikarenakan terjadinya kesalahan pengambilan kode rekening pada kontrak (SPK) untuk dua pekerjaan senilai Rp 194.217.705,-
5. Pengadaan pengharum ruangan otomatis gedung kompleks Balaikota penyerapan dengan prosentase 41,87% alasan tidak terserapnya anggaran tersebut dikarenakan harga komponen di sistem apbd,jakarta.go.id jauh lebih tinggi dari harga pasar dan kami sudah mengajukan usulan harga komponen baru di 2018.

8. Biro Administrasi Sekretariat Daerah

Pengukuran capaian kinerja Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setdaprov. DKI Jakarta dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. Selanjutnya akan dilakukan analisis dan evaluasi kinerja serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Biro Administrasi Keuangan dan Aset terbentuk pada tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 247 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, namun seiring dengan perkembangan dan perubahan



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

organisasi perangkat daerah disesuaikan menjadi Biro Administrasi Sekretariat Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 250 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah. Hal ini mengakibatkan berubahnya struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi.

Sebagai Unit Kerja Perangkat Daerah yang baru terbentuk, secara umum Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta telah dapat melaksanakan tugas pokok yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari 3 (tiga) sasaran yang telah ditetapkan, telah berhasil diwujudkan dengan sebagaimana mestinya. Berikut ini disajikan gambaran capaian kinerja sasaran strategis tahun 2017 Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setdaprov. DKI Jakarta secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.11 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2017

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
		2017	2017	2017	
1.	Meningkatnya pelayanan administrasi surat-menyurat dinas Sekretaris Daerah, Deputy Gubernur dan Asisten Sekda yang ditandai dengan singkatnya waktu pengurusan, tepatnya sasaran, dan efisiensinya biaya yang dikeluarkan	Persentase naskah dinas yang ditandatangani tepat waktu.	100%	100%	100%
2.	Terkelolanya aset Sekretariat Daerah dengan tertib dan teratur	Persentase data aset yang telah dicacah dan dikelola	800 data aset	800 data aset	100%
3.	Terkelolanya keuangan Sekretariat Daerah dengan tertib dan teratur.	1. Persentase pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu, tepat jumlah dan tepat orang sesuai listing.	100%	100%	100%
		2. Indek kepuasan layanan pembayaran perjalanan dinas SKPD/UKPD	3,00	3,00	100%



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Analisis atas capaian masing-masing sasaran tahun 2017 yang menggambarkan pencapaian kinerja, disertai dengan alternatif solusi yang akan dilakukan serta analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi surat menyurat dinas Sekretaris Daerah, Deputy Gubernur dan Asisten Sekda yang ditandai dengan singkatnya waktu pengurusan, tepatnya sasaran, dan efisisensinya biaya yang dikeluarkan.

Tindak lanjut atas Surat-surat yang berasal dari Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekretaris Daerah, Para Deputy Gubernur serta Para Asisten Deputy Gubernur sudah meningkat pelayanan administrasinya, yang ditandai dengan singkatnya waktu pengurusan, tepatnya sasaran dan efisiensinya biaya yang dikeluarkan. Pada tahun 2017, Biro Administrasi Sekretariat Daerah menerima surat masuk sebanyak 6.903 surat, dan menghasilkan surat yang harus ditindaklanjuti berupa surat keluar sebanyak 3.761 surat. Jumlah surat yang masuk jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah surat yang keluar disebabkan karena Biro Administrasi Sekretariat Daerah melayani pelaksanaan ketatausahaan Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Deputy Gubernur, Asisten Deputy Gubernur serta Biro Administrasi Sekretariat Daerah sendiri.

Hambatan yang dijumpai berkaitan dengan masalah pelayanan administrasi surat menyurat diantaranya disebabkan karena belum maksimalnya pemahaman mengenai ketatausahaan dalam penulisan naskah dinas, serta jalur birokrasi yang harus ditempuh terkadang mengurangi keefektifan waktu pelayanan administrasi surat menyurat.

Solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut diantaranya melalui peningkatan kapasitas kemampuan staf mengenai tata naskah dinas, serta peningkatan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka mengefektifkan waktu pelayanan administrasi surat menyurat.

2. Terkelolanya aset Sekretariat Daerah dengan tertib dan teratur

Dalam rangka tercapainya pengelolaan aset Sekretariat Daerah dengan tertib dan teratur, Biro Administrasi Sekretariat Daerah



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

menargetkan pencacahan aset tetap di tahun 2017 sebanyak 800 data aset dan berdasarkan hasil pencacahan berhasil mendapatkan data aset tetap sebanyak 800 data aset sebagaimana yang telah ditargetkan sebelumnya.

Grafik III.10 Persentase data aset yang telah dicacah dan dikelola



Untuk meningkatkan pengelolaan aset kedepan, Biro Administrasi Sekretariat Daerah akan melakukan beberapa tahap pendekatan, diantaranya :

- 1) Menentukan kebutuhan aset dengan mengacu pada pelayanan / jasa dalam hal ini adalah pemenuhan tugas dan fungsi Biro Administrasi Sekretariat Daerah.
- 2) Mengevaluasi aset yang ada untuk menentukan apakah kinerja aset tersebut sudah memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Biro sehari-hari.
- 3) Membandingkan aset yang digunakan dengan aset yang dibutuhkan, sehingga dapat diidentifikasi beberapa hal, diantaranya aset yang ada yang masih diperlukan dan masih mampu dalam mendukung tugas sehari-hari, aset yang ada yang masih dibutuhkan tetapi berada dibawah standar dan memerlukan perbaikan, aset yang berlebih serta aset yang harus dihapuskan.
- 4) Menyusun strategi aset yang berisikan rencana pengadaan, operasi, pemeliharaan dan penghapusan.
- 5) Mengadakan pencacahan aset secara berkala.



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

- 6) Meningkatkan koordinasi dengan UKPD-UKPD dibawah SKPD Setda dalam rangka memperoleh data-data aset yang tersedia secara akurat.
3. Terkelolanya Keuangan Sekretariat Daerah dengan tertib dan teratur.

Sasaran Strategis tersebut memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

- 1) Persentase pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu, tepat jumlah dan tepat orang sesuai listing

Berdasarkan salah satu fungsi Biro Administrasi Sekretariat Daerah yaitu pengelolaan kepegawaian Sekretariat Daerah, penganggaran gaji dan tunjangan PNS/CPNS UKPD-UKPD di lingkungan SKPD Sekretariat Daerah dianggarkan dalam DPA Biro Administrasi Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2017. Target dari indikator kinerja ini 100% dengan realisasi capaian 100%. UKPD-UKPD tersebut antara lain :

- 1) Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2) Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 3) Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 4) Asisten Deputi Gubernur
- 5) Sekretariat Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan
- 6) Biro Tata Pemerintahan
- 7) Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri
- 8) Biro Hukum
- 9) Biro Administrasi Sekretariat Daerah
- 10) Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
- 11) Biro Umum
- 12) Biro Perekonomian
- 13) Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
- 14) Biro Kesejahteraan Sosial
- 15) Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
- 16) Badan Pengawas Pemilihan Pemilu
- 17) Sekretariat BKSP Jabodetabekjur
- 18) Sekretariat KPU Kodya Jakarta Selatan



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Mengingat banyaknya UKPD di lingkungan SKPD Sekretariat Daerah, maka ketepatan waktu, jumlah serta jumlah pegawai dalam pembayaran gaji beserta tunjangan pegawai menjadi salah satu indikator pengelolaan keuangan yang baik di lingkungan SKPD Setda itu sendiri seperti yang selama ini sudah diimplementasikan.

Dari uraian diatas, hal-hal yang dapat menjadi pendorong maupun kendala terhadap ketepatan waktu, jumlah serta jumlah pegawai atas pembayaran gaji beserta tunjangan pada Biro Administrasi Sekretariat Daerah sangat ditentukan oleh sinergitas dari UKPD-UKPD yang berada di bawah SKPD Sekretariat Daerah, karena diperlukan adanya verifikasi dari masing-masing UKPD terhadap data gaji dan tunjangan pegawai yang akan dibayar.

Untuk menyikapi hal tersebut, diperlukan adanya koordinasi dan peningkatan kerjasama setiap UKPD agar dapat bersinergi dalam menghasilkan ketepatan waktu, jumlah serta jumlah pegawai dalam hal pembayaran gaji dan pegawai.

2) Indek kepuasan layanan pembayaran perjalanan dinas SKPD/UKPD.

Indikator kinerja tersebut memiliki target indeks kepuasan yang harus dicapai pada skala 3, dan berdasarkan hasil kuesioner pada tahun 2017 diperoleh capaian indeks kepuasan pada skala 3,44 atau sekitar 114,67%. Pengukuran indeks kepuasan menggunakan penghitungan statistik.



Grafik III.11 Indeks Kepuasan Layanan Pembayaran Perjalanan Dinas SKPD/UKPD Tahun 2017

Untuk memaksimalkan kepuasan pelayanan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Biro Administrasi Sekretariat Daerah akan melakukan beberapa strategi peningkatan pelayanan diantaranya yaitu :

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan yang ramah, ketepatan isi, cara dan waktu penyampaian, sehingga pegawai dapat menerima informasi dengan jelas dan tepat.
- 2) Menjalin dan menciptakan hubungan yang baik serta komunikasi yang baik dan lancar dengan sesama pegawai.
- 3) Memberikan ruang kepada pegawai untuk menilai pelayanan yang diberikan, misalnya melalui sistem saran dan kritik, atau dengan mengadakan survey kepuasan pelayanan.
- 4) Menyediakan ruang pelayanan yang lebih nyaman.

Berikut ini ditampilkan perbandingan capaian dari masing-masing indikator kinerja :

Tabel III.12 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja

No	INDIKATOR KINERJA	2015	2016	2017



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase naskah dinas yang ditandatangani tepat waktu	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase data aset yang telah dicacah dan dikelola	-	-	-	300 data aset	300 data aset	100%	800 data aset	800 Data aset	100%
3.	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu, tepat jumlah dan tepat orang sesuai listing	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Indeks kepuasan layanan pembayaran perjalanan dinas SKPD/UKPD	-	-	-	-	-	-	3,00	3,44	114,67%

Sehubungan dengan adanya perkembangan dan perubahan organisasi perangkat daerah, Biro Administrasi Keuangan dan Aset yang dibentuk pada tahun 2015 disesuaikan menjadi Biro Administrasi Sekretariat Daerah pada tahun 2017 yang mengakibatkan berubahnya struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi, sehingga Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja dari tahun 2015 sampai dengan 2017 tidaklah sama.

Untuk indikator Persentase naskah dinas yang ditandatangani tepat waktu hanya terdapat pada Perjanjian kinerja tahun 2016 dan 2017, dengan target, realisasi dan capaian yang sama yaitu sebesar 100%.

Indikator Persentase data aset yang telah dicacah dan dikelola juga hanya terdapat pada Perjanjian Kinerja tahun 2016 dan 2017. Target indikator tersebut di tahun 2016 yaitu sebanyak 300 data aset, dapat direalisasikan sebanyak 300 data aset, sehingga capaian realisasinya sebesar 100%. Sementara untuk target indikator tersebut di tahun 2017 meningkat, yaitu sebanyak 800 data aset, dengan realisasi sebanyak 800 data aset sehingga capaian realisasinya sebesar 100%.

Indikator Persentase pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu, tepat jumlah dan tepat orang sesuai listing juga hanya terdapat pada Perjanjian Kinerja tahun 2016 dan 2017, dengan target, realisasi dan capaian yang sama yaitu 100%.

Sementara untuk indikator Indeks kepuasan layanan pembayaran perjalanan dinas SKPD/UKPD hanya terdapat pada Perjanjian Kinerja tahun 2017 sehingga belum dapat dibandingkan capaiannya dengan capaian tahun sebelumnya.



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Pada tahun 2017 target dari indikator tersebut adalah pada skala 3, dan berdasarkan hasil survei kepuasan pegawai mendapat skala 3,44, sehingga capaiannya sebesar 114,67%.

A. Realisasi Anggaran

Gambaran capaian keberhasilan masing-masing program yang mendukung sasaran strategis tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.13 Tabel Realisasi Anggaran

PROGRAM	KEGIATAN	Anggaran Perubahan	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Administrasi Umum dan Kerumahtanggaan Daerah.	1.638.244.000	1.606.239.200	98,05%
	Peningkatan Pengelolaan dan Administrasi Tata usaha Deputi dan Para Asisten Deputi Gubernur.	586.608.000	581.325	99,11%
2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	129.320.318	107.262.555	82,94%
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	294.292.812	114.823.500	39,02%
	Penyediaan Sewa Mesin Foto Copy	840.000.084	371.140.000	44,18%
	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet	22.680.655.978	19.246.896.226	84,86%
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	30.520.600	3.585.000	11,75%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	210.836.670	149.733.500	71,02%
	Belanja Makanan dan Minuman	547.651.500	418.798.020	76,47%
	Penyediaan Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor / Lapangan Biro	691.761.030	687.499.283	99,38%
	Penyelenggaraan Tugas Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP)	898.000.000	638.100.000	71,06%



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

3	Program Pengelolaan Rumah Dinas	Penyediaan Jasa TALI dan IPAL Rumah Dinas	272.732.940	225.007.295	82,50%
4	Program Pengelolaan Kendaraan Dinas.	Perawatan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	843.866.360	299.546.894	35,5%
		Penyediaan jasa Perizinan KDO/KDO Khusus	45.097.000	27.969.550	62,02%
		Penyediaan BBM Kendaraan Dinas Operasional (KDO) Biro	657.518.400	286.368.479	43,55%
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan SkPD	Pelaksanaan Kunjungan Kerja Pejabat dan Staf	35.758.205.000	23.814.532.381	66,6%
		Penunjang Kelancaran Tugas Umum Pemerintahan	2.329.060.000	1.156.746.951	49,67%
Jumlah			68.454.370.692	49.735.606.834	72,66%

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta, dari total anggaran Belanja Langsung pada tahun 2017 sebesar Rp68.454.370.692,- (Enam puluh delapan miliar empat ratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah), anggaran yang dapat direalisasikan sebesar Rp49.735.606.834,- (Empat puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta enam ratus enam ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) atau sebesar 72,66% dari total anggaran. Sementara itu anggaran Belanja Tidak Langsung pada tahun 2017 sebesar Rp 552.558.885.180,- (Lima ratus lima puluh dua miliar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh rupiah), anggaran yang dapat direalisasikan sebesar Rp417.012.108.298,- (Empat ratus tujuh belas miliar dua belas juta seratus delapan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau sebesar 75,47%. Dapat disimpulkan, dari jumlah anggaran Belanja Langsung serta Belanja Tidak Langsung tahun 2017 sebesar Rp621.013.255.872,- (Enam ratus dua puluh satu miliar tiga belas juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah), jumlah anggaran yang dapat direalisasikan adalah sebesar



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Rp466.747.715.132,- (Empat ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima bels ribu seratus tiga puluh dua rupiah) atau sebesar 75,15%. Beberapa penyebab serta kendala yang dijumpai dan menjadi penyebab tidak maksimalnya penyerapan anggaran di lingkungan Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta beserta solusi pemecahan masalah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penyebab tidak maksimalnya penyerapan anggaran diantaranya sebagai berikut :
 - a) Masih terbatasnya Sumber Daya yang ada pada Biro Administrasi Sekretariat Daerah baik dari segi kuantitas maupun kualitas, mengingat Biro ini adalah Unit Kerja Perangkat Daerah yang baru terbentuk dan aktif sejak tahun 2015, sehingga Sumber Daya yang ada masih belum maksimal untuk menduduki dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang juga mengakibatkan masih belum maksimalnya pelaksanaan kegiatan di tahun 2017.
 - b) Kurangnya koordinasi terkait dengan Program, Kegiatan serta anggaran yang ada di Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda, sehingga penggunaan anggaran di Biro ini menjadi tidak terserap secara maksimal.
 - c) Kurang akuratnya penyusunan anggaran, hal ini disebabkan oleh terdapatnya Kegiatan yang sulit ditentukan indikator kinerjanya, Kegiatan yang anggarannya merupakan titipan dari SKPD lain. Perhitungan anggaran yang melebihi perkiraan.
 - d) Terbatasnya penggunaan kartu RFID yang hanya dapat digunakan pada SPBU dengan kode 31.
 - e) Untuk kegiatan service KDO belum mengikuti jadwal pemeliharaan rutin / berkala.
 - f) Terdapat proses penukaran, pengembalian dan penghapusan KDO sehingga berdampak pada jumlah dan jenis spesifikasi KDO yang berbeda sehingga tidak dapat dilakukan penyerapan maksimal.



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

- g) Terdapat perbedaan harga satuan komponen pada e-budgeting dengan harga satuan komponen sesungguhnya.
- h) Adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran.

2. Solusi pemecahan masalah :

- a) Meningkatkan Sumber Daya dari segi kuantitas dengan menambah jumlah pegawai di tiap Subbagian dengan pengetahuan, keterampilan serta pengalaman yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang akan dijalankan.
- b) Meningkatkan Sumber Daya dari segi kualitas melalui Pelatihan-pelatihan yang relevan dengan tugas pokok dan fungsinya.
- c) Meningkatkan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk lebih memaksimalkan penyerapan anggaran sesuai kebutuhan dengan memperhatikan unsur efisiensi dalam penggunaan anggaran.
- d) Meningkatkan akurasi dalam penyusunan anggaran serta ketepatan penetapan Program dan Kegiatan.
- e) Kerjasama lebih awal dengan PT Pertamina dalam penggunaan kartu RFID
- f) Menyusun jadwal pemeliharaan KDO rutin / berkala dengan cermat.

9. Biro Kesejahteraan Sosial

Biro Kesejahteraan Sosial mempunyai 2 (dua) sasaran strategis pada tahun 2017 yang terdiri dari :

- a. Tersusunnya kebijakan kesehatan, social dan pemberdayaan.

Sasaran strategis tersebut mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu jumlah kebijakan kesehatan, sosial dan pemberdayaan yang disusun, indikator tersebut mempunyai target yang harus dicapai sebanyak 5 rancangan kebijakan.

Untuk mencapai target tersebut Biro Kesejahteraan Sosial mempunyai program yaitu Program koordinasi kebijakan kesejahteraan sosial dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu:



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

1. Penyusunan dan Pembahasan Bahan Kebijakan Kesehatan Masyarakat. Dari kegiatan tersebut menghasilkan :
 - a. Pergub No 191 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu
 - b. Ingub No 95 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
 - c. Kεpgub No 2161 Tahun 2017 tentang Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu.
2. Penyusunan dan Pembahasan Bahan Kebijakan Pelayanan Kesehatan. Dari kegiatan tersebut menghasilkan :
 - a. Pergub No 32 Tahun 2017 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah dan belum menerapkan remunerasi
 - b. Instruksi Gubernur nomor 109 tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Penduduk pada Program Jaminan Kesehatan Nasional
 - c. Instruksi Gubernur Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penutupan Apotek Rakyat dan Penataan Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian di Provinsi DKI Jakarta.
 - d. Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2017 tentang Penataan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Kefarmasian.
 - e. Keputusan Gubernur Nomor 1564 Tahun 2017 tentang Pelayanan Visum Untuk Korban Kekerasan Pada Perempuan dan Anak
 - f. Keputusan Gubernur Nomor 1705 Tahun 2017 tentang Tarif Pengelolaan Darah



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

- g. Keputusan Gubernur Nomor 1369 Tahun 2017 tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan
 - h. Keputusan Gubernur Nomor 2221 tahun 2017 tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Korban Keracunan Makanan di Bumi Perkemahan Cibubur dan Korban Ledakan Gas Di Pademangan Barat.
3. Penyusunan dan Pembahasan Bahan Kebijakan Bidang Sosial.
- Dari kegiatan tersebut menghasilkan :
- a. Pergub No 8 Tahun 2017 tentang Layanan Gratis Masuk Taman Margasatwa Ragunan, Tugu Monas dan Museum pada hari biasa bagi masyarakat tertentu.
 - b. Pergub No 193 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi lansia
 - c. Keppub No 2270 Tahun 2017 tentang Besaran Biaya Makan Bagi WBS pada Panti Sosial Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 - d. Keppub No 2325 Tahun 2017 tentang Penetapan Lokasi Sebagian Tempat Pemakaman Umum Tegal Alur

Total capaian dari kegiatan tersebut tercapai 15 kebijakan dari target atau 300 persen.

- b. Terkoordinasi, termonitor dan terevaluasinya pelaksanaan kebijakan kesehatan, sosial dan pemberdayaan.

Sasaran strategis tersebut mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu jumlah laporan monev pelaksanaan kebijakan, indikator tersebut mempunyai target yang harus dicapai sebanyak 7 laporan.

Untuk mencapai target tersebut Biro Kesejahteraan Sosial mempunyai program yaitu Program koordinasi kebijakan kesejahteraan sosial dengan 6 (enam) kegiatan yaitu:

1. Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular menghasilkan laporan Evaluasi tentang



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengendalian Tuberkulosis.

2. Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Kesehatan Lingkungan menghasilkan Evaluasi Keputusan Gubernur 419 Tahun 2015 tentang Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat di Provinsi DKI Jakarta
3. Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan di Lapas, Rutan, Panti, RSUK, RSUD/RSKD menghasilkan Evaluasi RSUD Kelas D Di Provinsi DKI Jakarta.
4. Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Sistem Rujukan dengan menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 94 tahun 2017 tentang Pencegahan Kecurangan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional.
5. Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menghasilkan Laporan Evaluasi pelaksanaan Kebijakan Gugus Tugas Kota Layak Anak.
6. Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Distribusi Raskin di Provinsi DKI Jakarta menghasilkan laporan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Distribusi Raskin/Rastra di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016.
7. Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Sarana dan Prasarana Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas menghasilkan Evaluasi Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi DKI Jakarta

Capaian dari kegiatan tersebut tercapai 10 laporan dari target atau 150 persen.

10. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual

A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017

Pengukuran tingkat capaian kinerja Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.



Grafik III.12 perbandingan tersusunnya kebijakan tahun 2015 – 2017.



Secara umum dapat dikatakan bahwa sebagian besar pencapaian kinerja utama / target sasaran program prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2017 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017 tercapai dengan baik oleh Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta, walaupun masih ada beberapa sasaran tidak tercapai sesuai target, karena beberapa hal yang ditemukan pada saat pelaksanaan kegiatan tahun 2017.

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2017 Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari 2 program dan 20 kegiatan dengan total anggaran Rp. 5.142.900.018,- dan realisasi pertanggungjawaban anggaran mencapai 96,49 % atau sebesar Rp. 4.962.155.000,- terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Penetapan Kinerja Tahun 2017 Yaitu :

- (1) Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan pendidikan, keolahragaan, kepemudaan, perpustakaan daerah dan kearsipan daerah serta mental spiritual.
- (2) Terkoordinasi, termonitor dan terevaluasinya kebijakan penyelenggaraan pendidikan, keolahragaan, kepemudaan, perpustakaan daerah dan kearsipan daerah serta mental spiritual
- (3) Terlayannya jemaah haji Provinsi DKI Jakarta dengan baik



Tabel III.14 Tabel Capaian Sasaran Strategis Biro Dikmental Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan pendidikan, keolahragaan, kepemudaan, perpustakaan daerah, dan kearsipan daerah serta mental spiritual	Jumlah Kebijakan Pendidikan, Olahraga dan Pemuda, Perpustakaan dan Kearsipan Serta Mental Spiritual yang disusun	21 Bahan Kebijakan	27 Kebijakan	128%
	Jumlah kebijakan Pendidikan, Olahraga dan Pemuda, Perpustakaan dan Kearsipan serta Mental Spiritual yang terevaluasi	9 dokumen	9 dokumen	100%
Terlayannya Jamaah Haji Provinsi DKI Jakarta dengan baik	Persentase Jamaah Haji yang mendapatkan tambahan layanan dan pembinaan Pelaksanaan Ibadah Haji	100%	100%	100%

B. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

Program Koordinasi Kebijakan Pendidikan dan Olahraga serta Pembinaan Mental Spiritual merupakan program prioritas pada Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta. Program Koordinasi Kebijakan Pendidikan dan Olahraga serta Pembinaan Mental Spiritual dengan kode 1.20.016 dengan jumlah anggaran Rp. 5.142.900.018,- terdiri dari 20 kegiatan, 3 (tiga) sasaran strategis tahun 2017 dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang berhubungan yaitu :

- Kebijakan penyelenggaraan pendidikan, keolahragaan, kepemudaan dan perpustakaan daerah dan kearsipan daerah serta mental spiritual



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Pada tahun 2017 sasaran pelaksanaan program koordinasi kebijakan Biro Pendidikan dan Mental Spiritual dimaksud tersusunnya jumlah kebijakan sebanyak 27 kebijakan dari target 21 kebijakan. Pelaksanaan yang berkaitan dengan penyusunan dan pembahasan dapat berjalan dengan baik dari segi penyerapan anggaran maupun dalam pelaksanaan kegiatan.

- Koordinasi pendidikan, olahraga dan pemuda, perpustakaan dan kearsipan serta mental spiritual yang dilakukan pada tahun 2017 difokuskan pada pemantuan dan evaluasi dalam rangka menghimpun data dan informasi, sehingga dapat identifikasi sebanyak 9 dokumen laporan hasil pemantuan dan evaluasi sebagai berikut :

1. Monitoring implementasi Peraturan Gubernur Nomor 44 tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan Pemuda. Saran / rekomendasi yang dihasilkan :
 - a. Perbaiki Manajemen data hard file dan soft file, meliputi data perencanaan, persiapan dan pelaksanaan kegiatan, sehingga bisa mengukur monitoring dan evaluasi secara tepat.
 - b. Perencanaan dan pelaksanaan program sesuai dengan kebutuhan SKPD dan kondisi real di lapangan.
2. Pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan perpustakaan (Taman Bacaan Masyarakat). Saran / rekomendasi yang dihasilkan :
 - a. Dinas Perpustakaan dan Arsip harus membuat pedoman penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat (TBM).
 - b. Dinas Perpustakaan dan Arsip bisa mengajukan anggaran untuk pembelian buku-buku untuk Taman Bacaan Masyarakat melalui mekanisme hibah dengan kode rekening belanja pakai habis.
 - c. Dinas Perpustakaan dan Arsip harus memberi apresiasi kepada masyarakat yang berperan dan meningkatkan minat baca sesuai dengan aturan dalam Perda Perpustakaan.



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

- d. Terkait legalitas Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Dinas Pendidikan dimohon untuk memberikan ijin pendirian Taman Bacaan Masyarakat (TBM), sedangkan Dinas Perpustakaan dan Arsip berperan dalam hal pembinaannya.
3. Kegiatan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan kepemudaan. Saran / rekomendasi yang dihasilkan :
 - a. Pendataan yang lebih detail untuk organisasi kepemudaan yang ada di Provinsi DKI Jakarta.
 - b. Menghimpun masukan dari organisasi kepemudaan terkait tentang program kegiatan pembinaan generasi muda.
 - c. Untuk monitoring dan evaluasi selanjutnya agar disertai dengan kunjungan lapangan, melakukan wawancara langsung kepada pengelola Organisasi Kepemudaan agar mendapatkan data dan hasil sesuai yang ingin dicapai.
 4. Kegiatan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan keolahragaan, Peraturan Gubernur Nomor 172 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Veldrome dan Equestrian Venues Beserta Fasilitas Pendukungnya; serta Keputusan Gubernur Nomor 854 Tahun 2017 tentang Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Velodrome dan Equestrian Venues Beserta Fasilitas Pendukungnya. Saran / rekomendasi yang dihasilkan :
 - a. Adanya persetujuan dari Pemerintah Provinsi DKI apabila perubahan pelaksanaan dari dokumen teknis, berdasarkan usulan dari PT.Jakpro sebagai pelaksanan, terutama yang menyebabkan perubahan biaya pembangunan.
 - b. Pencairan dana terkait SPJ APBD-P 2017 dan APBD 2018 perlu mendapat dukungan dan perhatian, mengingat bulan November 2017 konsultan datang ke Indonesia dan Tahun 2018 ada 3 kali (bulan Februari, April, Juli 2018 perlu disiapkan anggarannya).
 - c. Dukungan SDM baik dari Dinas, Sudin dan Instansi terkait yang masuk di Kepgub, Ingub maupun Pergub sesuai tupoksinya.



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

- d. Permudah dalam pengajuan anggaran dan komponennya yang terkait Asian Games.
 - e. Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian (Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan)
 - f. Transportasi dibantu oleh Dinas Perhubungan, Bina Marga dan Karantina.
5. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi terhadap kebijakan; Pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan, Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan, Pelaksanaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (BOPPAUD), Kebijakan Pimpinan terkait pendirian PAUD. Saran / rekomendasi :
- a. Bahwa kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Penyusunan dan Pembahasan kiranya dapat dilaksanakan setiap tahun, mengingat kegiatan tersebut sangat mendukung tugas dan fungsi Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta.
 - b. Dinas Pendidikan agar melaksanakan pembinaan secara terus menerus terhadap satuan-satuan pendidikan non formal, baik pembinaan teknis maupun administrasi.
 - c. Berkenaan dengan perizinan satuan-satuan pendidikan non formal, agar SKPD terkait senantiasa memberikan pembinaan dan sosialisasi terhadap kebijakan-kebijakan yang berlaku.
6. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Implementasi bahan kebijakan mental spiritual (Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Tahun 2017) Saran / rekomendasi :
- a. Dalam melengkapi persyaratan pencairan bantuan dana hibah, syarat yang dibutuhkan formatnya sudah baku dan diberikan contoh.
 - b. Hibah disarankan turun lebih cepat dan untuk lembaga bentukan Pemprov DKI diprioritaskan.
 - c. Dalam melengkapi berkas-berkas proposal diharapkan tidak berulang-ulang. Pemberian bantuan seyogyanya disesuaikan dengan besarnya anggaran yang diajukan



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

7. Kegiatan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan BOP dan KJP tahun 2017. Saran / rekomendasi L:
 - a. Koordinasi yang terjalin dengan baik antar SKPD/UKPD terkait perlu terus ditingkatkan agar dalam penyusunan bahan kebijakan dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan perencanaan terhadap kebijakan yang akan diimplementasikan.
 - b. Kebijakan di bidang pendidikan perlu dilakukan kajian yang mendalam terkait dengan kebutuhan dan peningkatan mutu pendidikan di Provinsi DKI Jakarta.
 - c. Hasil evaluasi implementasi kebijakan KJP dan BOP tahun 2017 dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kebutuhan dan mekanisme serta kebijakan yang mendasarinya.
 - d. Penyusunan bahan kebijakan di bidang pendidikan dasar dan menengah sifatnya dinamis sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan yang mendasari perlunya kebijakan tersebut ditetapkan.
 - e. Perlunya percepatan terhadap penyusunan bahan kebijakan agar kebijakan yang akan dihasilkan dapat diimplementasikan sesegera mungkin karena memiliki peran yang signifikan terhadap suatu program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD/ UKPD terkait.
8. Kegiatan Acara Keagamaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 adalah menyelenggarakan Kegiatan Acara Keagamaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa kunjungan Safari Jum'at, Safari Ramadhan, Silaturahmi Ulama Umara dan Monitoring Malam Natal Keliling Tahun 2017. Saran /rekomendasi :
 - a. Pertemuan antara Ulama/Tokoh Agama dan Umara harus dilakukan berkesinambungan mengingat peran Ulama/Tokoh Agama sebagai panutan mempunyai daya Tarik terutama di masyarakat Provinsi DKI Jakarta.
 - b. Data dan informasi tempat ibadah (Masjid) yang merupakan tempat dilakukannya kunjungan Kegiatan Keagamaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus akurat dan tepat sasaran.



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

- c. Jadwal kunjungan dan tempat yang akan dikunjungi diharapkan tidak berubah sampai akhir kegiatan untuk memastikan data transfer bantuan yang akan diberikan oleh BAZIS Provinsi DKI Jakarta.
 - d. Permasalahan yang menyangkut pembinaan bidang mental spiritual dan pendidikan perlu dilakukan koordinasi yang lebih intens dengan para Ulama/Tokoh Agama agar didapatkan solusi serta jalan keluar yang terbaik.
 - e. Seluruh kegiatan Keagamaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu diliput oleh media massa baik cetak maupun elektronik, maka untuk itu perlu dikoordinasikan bersama unit terkait mengenai dukungan yang dibutuhkan.
 - f. Bantuan yang diberikan berupa dana pembinaan untuk Masjid alokasinya tidak hanya dari BAZIS Provinsi DKI Jakarta, namun perlu disosialisasikan kepada unit terkait serta Perusahaan BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
 - g. Kegiatan Sholat Jum'at keliling diharapkan menjadi sebuah kegiatan prioritas dikarenakan dengan kegiatan Jum'at keliling tidak hanya bertujuan untuk Sholat Jum'at bersama masyarakat semata namun juga dapat menampung secara langsung aspirasi masyarakat di setiap wilayah Provinsi DKI Jakarta.
 - h. Natal Keliling menjadi salah satu kegiatan keagamaan untuk melihat secara langsung kegiatan Misa Malam Natal dan juga melihat kerukunan umat beragama untuk saling bertoleransi, namun terkait Gereja-gereja yang dikunjungi diharapkan setiap tahunnya berpindah ke Gereja lainnya guna dapat mengetahui kondisi dan situasi di gereja tersebut.
9. Kegiatan Seleksi dan Pelatihan Petugas Haji Daerah Provinsi DKI Jakarta, meliputi Pembuatan Surat Edaran Gubernur tentang rekrutmen/penerimaan petugas haji daerah tahun 2017, pengumuman rekrutmen Petugas Haji Daerah tahun 2017, Seleksi Petugas Haji Daerah Tahun 2017, Penetapan Petugas Haji Daerah Tahun 2017, Pelatihan Petugas Haji Daerah Tahun 2017 dan pengukuhan Petugas Haji Daerah Tahun 2017, Saran/rekomendasi:



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

- a. Perlu koordinasi yang lebih efektif dan efisien antara Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta dan jajarannya dalam membina kedisiplinan petugas haji daerah Provinsi DKI Jakarta.
- b. Perlu kerjasama dan kekompakkan antara para petugas dalam melayani Jemaah baik sesama petugas kloter maupun antara petugas kloter dan non kloter.
- c. Perlu dibentuk tim pengawas untuk memantau kinerja petugas karena masih ada petugas yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada melayani Jemaah haji.

Pelaksanaan yang berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi dapat berjalan dengan baik dari segi penyerapan anggaran maupun dalam pelaksanaan kegiatan.

- Jemaah haji yang mendapatkan tambahan layanan dan pembinaan Pelaksanaan Ibadah Haji

Bahwa jemaah haji DKI Jakarta sebanyak 8.148 jemaah mendapat tambahan layanan berupa penugasan TPHD sebanyak 25 orang, TKHD sebanyak 25 orang yang tergabung dalam 22 kloter DKI serta layanan berupa obat-obatan dan penyediaan posko DKI Jakarta.

C. . AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2017 pada Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta, dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel III.15 Realisasi Anggaran Biro Pendidikan dan Mental Spiritual

Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017

			PAGU	REALISASI	CAPAIAN %	
1	Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan pendidikan, keolahragaan, kepemudaan, perpustakaan daerah dan kearsipan daerah serta mental spiritual	1	Jumlah kebijakan pendidikan, olahraga dan pemuda, perpustakaan dan kearsipan serta mental spiritual yang disusun	Rp. 100.880.000,-	Rp. 82.614.000,-	81.89%
	Terkoordinasinya, termonitor dan terevaluasinya kebijakan penyelenggaraan pendidikan, keolahragaan, kepemudaan, perpustakaan daerah dan kearsipan daerah serta mental spiritual	2	Jumlah koordinasi pendidikan, olahraga dan pemuda, perpustakaan dan kearsipan serta mental spiritual yang dilakukan	Rp.66.050.000,-	Rp.65.997.000,-	99.92%
3	Terlayannya Jemaah haji Provinsi DKI Jakarta dengan baik	1	Persentase Jemaah haji yang mendapatkan tambahan layanan dan Pembinaan ibadah haji	Rp. 4.637.056.724,-	Rp. 4.504.501.325,-	97.14%



Presentase realisasi anggaran ketiga indikator sasaran tersebut sebagai berikut :

1. Jumlah kebijakan Pendidikan, Olahraga dan Pemuda, Perpustakaan dan Kearsipan serta Mental Spiritual yang disusun sebesar Rp. 82.614.000,- (81,89%), hal ini dikarenakan adanya efisiensi dalam belanja tenaga ahli / Instruktur / Narasumber.
2. Jumlah koordinasi Pendidikan, Olahraga dan Pemuda, Perpustakaan dan Kearsipan serta Mental Spiritual yang dilakukan sebesar Rp.65.997.000,- (99,92%), hal ini dikarenakan adanya efisiensi dalam belanja uang makanan dan minuman rapat.
3. Jemaah Haji yang mendapatkan tambahan layanan dan pembinaan ibadah haji sebesar Rp.4.504.501.325,- (97,14%), hal ini dikarenakan adanya efisiensi untuk belanja sewa tenda untuk kegiatan seleksi dan pelatihan petugas haji daerah dan efisiensi belanja sewa gedung untuk kegiatan pemantauan keberangkatan (Embarkasi) dan pemulangan (debarkasi) Petugas Haji Daerah.

Tabel III.16

Realisasi dan Prosentase Anggaran Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017

Sumber Dana	Uraian	Rencana/Dalam DPA (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Kinerja (%)
APBD	Anggaran Prioritas	5.142.900.018	4.962.155.000	96,49%

Grafik III.13

Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2015-2017





PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Dilihat dari sisi realisasi anggaran APBD Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 sebesar 96,49% (Anggaran Belanja Langsung) mengalami kenaikan dibandingkan realisasi anggaran tahun 2016 yang mencapai 91,57 %. Realisasi Anggaran Tahun 2017 merupakan pencapaian tahun kelima dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJ) 2013 – 2017.



B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak (dua puluh empat) sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2017, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel III.13
Realisasi Anggaran Capaian IKU Sekretariat Daerah Tahun 2017

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Pagu	Realisasi	% Capaian	
FUNGSI TATA PEMERINTAHAN						
1	Meningkatnya Koordinasi Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan di bidang Tata Pemerintahan dan Aparatur	1	Tersusunnya draft Rancangan UU Revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009	802.375.000	551.337.400	68,71
		2	Tersusunnya dan terlaksananya Implementasi Kebijakan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan	(anggaran bergabung pada kegiatan dengan indikator kinerja Tersusunnya draft Rancangan UU Revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007/Program Koordinasi Kebijakan Tata Pemerintahan Daerah)	-	-
		3	Kesepakatan 3 Bidang Kerjasama dengan daerah perbatasan Jakarta meliputi Baku Mutu Air, Transportasi dan RTH	208.395.700	176.100.500	84,50
FUNGSI HUKUM						
1	Meningkatnya jumlah Raperda/Perda dan Rapergub/Pergub yang dievaluasi	1	Jumlah Produk Hukum yang diharmonisasi	Rp. 35.480.000	Rp. 25.269.500	71,22



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Pagu	Realisasi	% Capaian	
	dan disempurnakan					
2	Meningkatnya penyelesaian hukum dan penanganan perkara	1	Jumlah perkara pengadilan yang tertangani	Rp. 1.932.687.402	Rp. 1.161.082.097	60.08
		2	Jumlah sengketa terselesaikan dan terkoordinasi	Rp. 25.700.000	Rp. 18.827.500	73.26
FUNGSI ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI						
1	Meningkatnya penataan SDM yang sesuai dengan kelembagaan yang tepat ukuran dan tepat fungsi	1	Tersusunnya formasi jabatan, kelas jabatan dan nilai jabatan	88.303.000	65.986.000	74.66
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD		Peningkatan penilaian predikat LKIP	12.977.500	11.020.000	84.92%
FUNGSI KEPALA DAERAH DAN KERJASAMA LUAR NEGERI						
1	Meningkatnya hubungan, kerjasama dan partisipasi daerah pada event dan organisasi internasional yang efektif dan efisien		Jumlah keanggotaan dan partisipasi daerah dalam Organisasi Internasional	565.745.000	423.432.787	74,85%
2	Meningkatnya kerjasama sister city yang mendukung pelaksanaan 9 program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		Jumlah kerjasama Sister City	432.165.000	332.158.800	76,86%
3	Meningkatnya pelayanan keprotokolan dan administrasi Pimpinan Daerah yang professional dan efisien		Terlaksananya Aktifitas Keprotokolan Daerah	11.117.627.384	8.495.971.282	76,42%
4	Meningkatnya Produktivitas Aparat		% Rata rata kinerja SDM KDH dan KLN	2.591.074.121	1.673.328.834	64,58%
FUNGSI PEREKONOMIAN						
1	Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan, mengkoordinasikan,	1	Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Transportasi di Provinsi DKI Jakarta	11.500.000	8.500.000	73,91%



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Pagu	Realisasi	% Capaian	
	memantau, mengevaluasi dan membina KUMKM, Industri, Energi dan Perdagangan Usaha, Perhubungan, Pariwisata, Ketenagakerjaan, Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan, Penanaman Modal dan Promosi dan BUMD	2	Pantauan harga pangan Strategis di Provinsi DKI Jakarta	13.100.000	13.100.000	100%
		3	Monitoring pelaksanaan Perizinan/non Perizinan Bidang Perekonomian pada PTSP di Provinsi DKI Jakarta	11.100.000	11.100.000	100%
		4	Monitoring, Evaluasi dan Perumusan Kebijakan Koperasi dan UMKM di Provinsi DKI Jakarta	8.700.000	8.700.000	100%
		5	Tim Pengendalian Inflasi Daerah	32.500.000	32.500.000	100%

FUNGSI PENATAAN KOTA DAN LINGKUNGAN HIDUP

1	Optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten	1	Terlaksananya koordinasi yang intensif, efektif dan efisien	856.226.035	775.395.779	90,56%
2	Meningkatnya pelaksanaan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dan berketahanan dalam menghadapi resiko bencana dan dampak perubahan iklim	1	Terkumpul dan terolahnya data yang diperlukan dalam perumusan kebijakan			
		2	Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan kegiatan koordinasi			

FUNGSI UMUM

1	Meningkatnya kualitas pengelolaan kerumahaan dilingkungan kompleks gedung Balaikota	1	Persentase berkurangnya keluhan terhadap pelayanan kebersihan, AC, Air, Lift, dan Lampu Penerangan Kantor	7.924.141.552	3.363.489.767	42,45 %
2	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi surat-menyurat	2	Lama penyelesaian tiknet naskah dinas yang ditandatangani Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda (Kurang dari 40 lembar)	-	-	-
3	Meningkatnya kualitas keamanan dan ketertiban di lingkungan	3	Persentase menurunnya kasus tindak kriminal	35.814.175.874.	27.286.768.092	76,19 %



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Pagu	Realisasi	% Capaian
	Balaikota				
4	Meningkatnya produktifitas Aparat Biro Umum	4 Persentase Aparat yang kompeten	-	-	-
FUNGSI ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH					
1	Meningkatnya pelayanan administrasi surat-menyurat dinas Sekretariat Daerah, deputi Gubernur dan Asisten Sekda yang ditandai dengan singkatnya waktu pengurusan, tepatnya sasaran dan efisiensinya biaya yang dikeluarkan	1 Persentase naskah dinas yang ditandatangani tepat waktu	Rp.2.224.852.000,-	Rp.2.187.597.200,-	98,33%
2	Terkelolanya keuangan dan aset Sekretariat Daerah yang tertib dan teratur	1 Persentase pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu, tepat jumlah dan tepat orang sesuai listing	Rp.552.558.885.180,-	Rp.552.558.885.180,-	75,47%
		2 Indeks Kepuasan layananan Pembayaran Perjalanan Dinas DKPD/UKPD	Rp.38.087.265.000,-	Rp.24.971.279.332,-	65,56%
3	Terkelolanya asset Sekretariat Daerah dengan tertib dan teratur	1 Persentase data asset yang telah dicacah dan dikelola	Rp.1.546.481.760,-	Rp.613.884.923,-	39,70%
FUNGSI KESEJAHTERAAN SOSIAL					
1	Tersusunnya Kebijakan kesehatan, social dan Pemberdayaan	1 Jumlah kebijakan kesehatan, sosial dan pemberdayaan yang tersusun	108.400.000	105.951.000	97.74 %
2	Terkoordinasi, Termonitor dan Terevaluasinya Pelaksanaan kebijakan Kesehatan, social dan PEmberdayaan	2 Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan	231.410.000	223.926.000	96.77%
FUNGSI PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL					
1	Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan pendidikan,	1 Jumlah kebijakan pendidikan, olahraga dan pemuda,	Rp. 100.880.000,-	Rp. 82.614.000,-	81.89%



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

No	Sasaran		Indikator Kinerja	Pagu	Realisasi	% Capaian
	keolahragaan, kepemudaan, perpustakaan daerah dan kearsipan daerah serta mental spiritual		perpustakaan dan kearsipan serta mental spiritual yang disusun			
2	Terkoordinasinya, termonitor dan terevaluasinya kebijakan penyelenggaraan pendidikan, keolahragaan, kepemudaan, perpustakaan daerah dan kearsipan daerah serta mental spiritual	2	Jumlah koordinasi pendidikan, olahraga dan pemuda, perpustakaan dan kearsipan serta mental spiritual yang dilakukan	Rp.66.050.000,-	Rp.65.997.000,-	99.92%
3	Terlayannya Jemaah haji Provinsi DKI Jakarta dengan baik	1	Persentase Jemaah haji yang mendapatkan tambahan layanan dan Pembinaan ibadah haji	Rp. 4.637.056.724,-	Rp. 4.504.501.325,-	97.14%





BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan informasi mengenai gambaran umum dan capaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang diuraikan secara sistematis mulai Bab I sampai dengan Bab III, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama mengenai akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah yang diamanatkan oleh Peraturan Gubernur Nomor 250 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah telah terlaksana dengan baik.
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta bersama-sama dengan segenap jajarannya telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas Gubernur.
3. Dalam pencapaian sasaran strategis, dari 24 (dua puluh empat) sasaran strategis yang ditetapkan, telah berhasil diwujudkan dengan baik keseluruhan sasaran tersebut. Keberhasilan tersebut lebih disebabkan pada peningkatan upaya perbaikan kinerja Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
4. Dari sasaran strategis yang telah dicapai tersebut, masih terdapat beberapa perbedaan dengan kondisi yang diharapkan. Hal ini terlihat pada indikator kinerja yang digunakan pada pencapaian sasaran ini adalah pada tingkat *output*.



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PREMI LASARI, AP, M.Si

Jabatan : KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Selanjutnya disebut pihak pertama, .

Nama : Dr. H. SAEFULLAH, M.Pd

Jabatan : SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Januari 2017

Pihak Kedua,

Sekretaris Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Dr. H. Saefullah, M.Pd
NIP196402111984031002

Pihak Pertama,

Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Premi Lasari, AP, M.Si
NIP 197402241993112001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

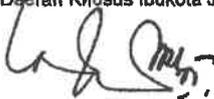
BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya koordinasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan di bidang Tata Pemerintahan dan Aparatur	Tersusunnya Draft Rancangan UU Revisi UU No. 29 Tahun 2009	1 Draft Rancangan UU
		Tersusunnya dan Terlaksananya Implementasi Kebijakan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan	Draft Perda RT/RW
		Kesepakatan 3 Bidang Kerjasama dengan daerah perbatasan Jakarta meliputi Baku Mutu Air, Transportasi dan RTH	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bersama Bodejabekjur, Provinsi Lainnya dan Lembaga/ Badan

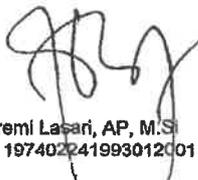
No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Koordinasi Kebijakan Tata Pemerintahan Daerah	Rp802,375,000	APBD
2	Program Peningkatan Kerjasama Antardaerah dan Luar Negeri	Rp208,395,700	APBD

Jakarta, 27 Januari 2017

Sekretaris Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,


Dr. H. Saefullah, M.Pd
NIP. 19640211984031002

Kepala Biro Tata Pemerintahan
Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,


Premi Lasari, AP, M.Si
NIP 197402241993012001



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YAYAN YUHANAH, SH, MH

Jabatan : KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Dr. H. SAEFULLAH, M.Pd

Jabatan : SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Januari 2017

Pihak Kedua,

Sekretaris Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Dr. H. Saefullah, M.Pd
NIP196402111984031002

Pihak Pertama,

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta,

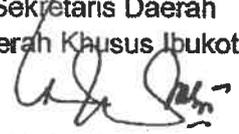
Yayan Yuhanah, SH, MH
NIP 196508241994032003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BIRO HUKUM SETDA PROVINSI DKI JAKARTA**

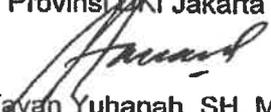
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	meningkatkan jumlah Raperda/ Perda dan Rapergub/Pergub yang dievaluasi dan disempurnakan	Jumlah Produk Hukum yang diharmonisasi	10 Produk Hukum Daerah
2.	meningkatkan penyelesaian hukum dan penanganan perkara	Jumlah Perkara di Pengadilan yang tertangani	40 Perkara
		Jumlah Sengketa yang terselesaikan dan terkoordinasi	250 Sengketa

	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1.	Program Penataan dan Penyusunan Peraturan	Rp. 35.480.000	APBD
2.	Program Peningkatan Bantuan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia	Rp. 2.847.245.706	APBD

Sekretaris Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta


Dr. H. Saefulah, M.Pd
NIP. 196402111984031002

Jakarta, 27 Januari 2017
Kepala Biro Hukum Setda
Provinsi DKI Jakarta


Yayan Yuhanah, SH, MH
NIP 196508241994032003



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DHANY SUKMA, S.Sos, MAP

Jabatan : KEPALA BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI SETDA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Dr. H. SAEFULLAH, M.Pd

Jabatan : SEKRETARIS DAERAH ,PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Januari 2017

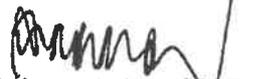
Pihak Kedua,

Sekretaris Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,


Dr. H. Saefullah, M.Pd
NIP 196402111984031002

Pihak Pertama,

Kepala Biro Organisasi dan Reformasi
Birokrasi Setda Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,


Dhany Sukma, S.Sos, MAP
NIP 197403091993111001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya penataan SDM yang sesuai dengan kelembagaan yang tepat ukuran dan tepat fungsi	Tersusunnya formasi jabatan, kelas jabatan dan nilai jabatan	42 Pergub
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Peningkatan Penilaian/Predikat LKIP	BB

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan SDM Aparatur	Rp 88,303,000.00	APBD
2	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Rp 12,977,500.00	APBD

Jakarta, 27 Januari 2017

Sekretaris Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Dr. H. Saefullah, M.Pd
NIP 196402111984031002

Kepala Biro Organisasi dan
Reformasi Birokrasi
Setda Provinsi DKI Jakarta,



Dhany Sukma, S.Sos, MA
NIP 197403091993111001



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. SRI HARYATI, M.Si

Jabatan : KEPALA BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Dr. H. SAEFULLAH, M.Pd

Jabatan : SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Januari 2017

Pihak Kedua,

Sekretaris Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Dr. H. Saefullah, M.Pd
NIP196402111984031002

Pihak Pertama,

Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Dr. Sri Haryati, M.Si
NIP 19707071997032004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan membina KUMKM, Industri, Energi dan Perdagangan, Usaha Perhubungan, Pariwisata, Ketenagakerjaan, Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan, Penanaman Modal, Promosi dan BUMD	Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Transportasi di Provinsi DKI Jakarta	Dokumen
		Pemantauan Harga Pangan Strategis di Provinsi DKI Jakarta	Dokumen
		Monitoring Pelaksanaan Perizinan/Non Perizinan Bidang Perekonomian pada PTSP di Provinsi DKI Jakarta	Dokumen
		Monitoring, Evaluasi dan Perumusan Kebijakan Koperasi dan UMKM di Provinsi DKI Jakarta	Dokumen
		Tim Pengendalian Inflasi Daerah	Dokumen

No.	Program	Anggaran
1	Program Koordinasi Kebijakan Perekonomian	76,900,000

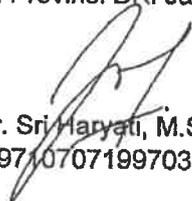
Jakarta, 27 Januari 2017

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
 Ibukota Jakarta



Dr. H. Saefullah, M.Pd
 NIP 196402111984031002

Kepala Biro Perekonomian
 Setda Provinsi DKI Jakarta



Dr. Sri Haryati, M.Si
 NIP. 197107071997032004



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. AGUSTINO DARMAWAN, MM

Jabatan : KEPALA BIRO UMUM SETDA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Dr. H. SAEFULLAH, M.Pd

Jabatan : SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Januari 2017

Pihak Kedua,

Sekretaris Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Dr. H. Saefullah, M.Pd
NIP 196402111984031002

Pihak Pertama,

Kepala Biro Umum Setda Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta,

Ir. Agustino Darmawan, MM
NIP 195908201991121001

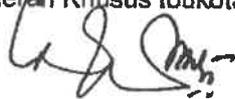
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan kerumahtanggaan di Lingkungan Kompleks Gedung Balaikota	Persentase berkurangnya keluhan terhadap pelayanan kebersihan, AC, air, lift dan lampu penerangan kantor	20%
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi surat menyurat	Lama penyelesaian tiket naskah dinas yang ditandatangani Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda (kurang dari 40 lembar)	2 hari
3.	Meningkatnya kualitas keamanan dan ketertiban di Lingkungan Balaikota	Persentase menurunnya kasus tindak kriminal	20%
4.	Meningkatnya produktivitas Aparat Biro Umum	Persentase aparat yang kompeten	90%

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1.	Program Administrasi Umum dan Kerumahtanggaan Daerah	7,924,141,552.00	APBD
2.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor	35,814,175,874.00	
	Total Anggaran	43,738,317,426.00	

Jakarta, 27 Januari 2017

Sekretaris Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Dr. H. Saefullah, M.Pd
NIP 196402111984031002

Kepala Biro Umum
Setda Provinsi DKI Jakarta,



Mr. Agustino Darmawan, MM
NIP 195908201991121001



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. DENNY WAHYU HARYANTO, M.Si

Jabatan : KEPALA BIRO ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH SETDA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Dr. H. SAEFULLAH, M.Pd

Jabatan : SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Januari 2017

Pihak Kedua,

Sekretaris Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Dr. H. Saefullah, M.Pd
NIP196402111984031002

Pihak Pertama,

Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah
Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta,

Drs. Denny Wahyu Haryanto, M.Si
NIP 197112041991011001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BIRO ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH SETDA PROVINSI DKI JAKARTA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya pelayanan administrasi surat-menyurat dinas Sekretaris Daerah, Deputi Gubernur dan Asisten Sekda yang ditandai dengan singkatnya waktu pengurusan, tepatnya sasaran, dan efisiensinya biaya yang dikeluarkan	Persentase maskah dinas yang ditandatangani tepat waktu	100%
Terkelolanya aset sekretariat daerah dengan tertib dan teratur	Persentase data aset yang telah dicacah dan dikelola	800 data aset
Terkelolanya keuangan sekretariat daerah dengan tertib dan teratur	1. Persentase pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu, tepat jumlah dan tepat orang sesuai listing	100%
	2. Indek kepuasan layanan pembayaran perjalanan dinas SKPD/UKPD	3.00

Program	Anggaran	Keterangan
Program Administrasi Umum dan Kerumahtangaan Daerah	Rp 1,994,852,000	APBD
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor	Rp 32,155,496,469	APBD
Program Pengelolaan Rumah Dinas	Rp 893,401,331	APBD
Program Pengelolaan Kendaraan Dinas	Rp 2,388,102,980	APBD
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD	Rp 47,139,283,000	APBD

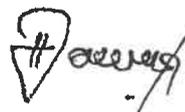
Jakarta, 27 Januari 2017

Sekretaris Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Dr. H. Saefullah, M.Pd
NIP. 19640211984031002

Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah
Setda Provinsi DKI Jakarta



Drs. Denny Wahyu Haryanto, M.Si
NIP 197112041991011001



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. VERA REVINA SARI, M.Eng
Jabatan : KEPALA BIRO PENATAAN KOTA DAN LINGKUNGAN HIDUP SETDA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Dr. H. SAEFULLAH, M.Pd
Jabatan : SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Januari 2017

Pihak Kedua,

Sekretaris Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Dr. H. Saefullah, M.Pd
NIP196402111984031002

Pihak Pertama,

Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan
Hidup Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta,

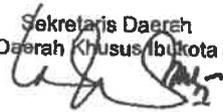
Ir. Vera Revina Sari, M.Eng
NIP 196710291995032002

**PERJANJIAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 2017
BIRO PENATAAN KOTA DAN LINGKUNGAN HIDUP SETDA PROVINSI DKI JAKARTA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten	Terlaksananya koordinasi yang intensif, efektif dan efisien	250 Kali Pelaksanaan Koordinasi
2.	Meningkatnya pelaksanaan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dan berketahanan dalam menghadapi resiko bencana dan dampak perubahan iklim	Terkumpul dan terolahnya data yang diperlukan dalam perumusan kebijakan	20 Dokumen PPK
		Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan kegiatan koordinasi	13 Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi

No	Program	Anggaran
1.	Program Koordinasi Kebijakan Prasarana dan Sarana Kota	Rp 1,650,000
2	Program Koordinasi Kebijakan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Rp 80,500,000
3	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Rp 774,076,035

Sekretaris Daerah
Provinsi Daerah Khusus/Ibukota Jakarta,


Dr. H. Saefulah, M.Pd
NIP 196402111984031002

Jakarta, 27 Januari 2017
Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta,


Ir. Vera Revina Sari, M.Eng
NIP 196710291995032002



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMAD MAWARDI, SH

Jabatan : KEPALA BIRO KEPALA DAERAH DAN KERJASAMA LUAR NEGERI
SETDA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Dr. H. SAEFULLAH, M.Pd

Jabatan : SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Januari 2017

Pihak Kedua,

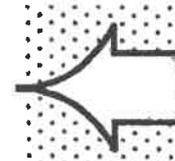
Sekretaris Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Dr. H. Saefullah, M.Pd
NIP196402111984031032

Pihak Pertama,

Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama
Luar Negeri Setda Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Muhamad Mawardi, SH
NIP 196404041984101003



SIK
1003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BIRO KEPALA DAERAH DAN KERJASAMA LUAR NEGERI
SETDA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya hubungan, kerjasama dan partisipasi daerah pada event dan organisasi internasional yang efektif dan efisien	Jumlah Keanggotaan dan Partisipasi Daerah dalam Organisasi Internasional	11 Organisasi internasional
		18 event internasional
Meningkatnya kerjasama Sister City yang mendukung pelaksanaan 9 program unggulan Pemprov DKI Jakarta	Jumlah kerjasama Sister City	1 calon sister city
		9 isu
		4 kota aktif melaksanakan program
		30 peserta
Meningkatnya pelayanan keprotokolan dan administrasi Pimpinan Daerah yang profesional dan efisien	Terlaksananya Aktifitas Keprotokolan daerah	Kunjungan 4 Sister City
		1.400 acara
		1.400 Agenda
Meningkatnya produktivitas aparat	% Rata-rata Kinerja SDM Biro KDH dan KLN	100% TL Surat Gub/Wagub/Sekda/Deputi
		90%

Program	Anggaran	Keterangan
Program Peningkatan Kerjasama antar Daerah dan Luar Negeri	Rp 997,910,000	APBD
Program Keprotokolan dan Administrasi Pimpinan Daerah	Rp 11,552.943,534	APBD

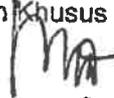
Jakarta, 27 Januari 2017

Sekretaris Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Dr. H. Saefullah, M.Pd
NIP. 19640211984031002

Kepala Biro Kepala Daerah dan
Kerjasama Luar Negeri Setda
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Munamad Mawardi, SH
NIP. 196404041984101003



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen, pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. ADI ARIANTARA, MM

Jabatan : KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL SETDA PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Dr. H. SAEFULLAH, M.Pd

Jabatan : SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Januari 2017

Pihak Kedua,

Sekretaris Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Dr. H. Saefullah, M.Pd
NIP196402111984031002

Pihak Pertama,

Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

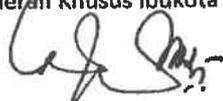
Ir. Adi Ariantara, MM
NIP 196104211985091001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL SETDA PROVINSI DKI JAKARTA**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersusunnya kebijakan kesehatan, sosial dan pemberdayaan	Jumlah kebijakan kesehatan, sosial dan pemberdayaan yang disusun	5 Rancangan Kebijakan
2	Terkoordinasi, termonitor dan terevaluasinya pelaksanaan kebijakan kesehatan, sosial dan pemberdayaan	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan	7 dokumen laporan

NO	Program	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Koordinasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial	374,530,000	

Sekretaris Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ,



Dr. H. Saefullah, M.Pd
NIP 196402111984031002

Jakarta, 27 Januari 2017

Kepala Biro Kesejahteraan Sosial
Setda Provinsi DKI Jakarta



Ir. Adi Ariantara, MM
NIP 196104211985091001



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HENDRA HIDAYAT, S. IP

Jabatan : KEPALA BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL SETDA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Dr. H. SAEFULLAH, M.Pd

Jabatan : SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Januari 2017

Pihak Kedua,

Sekretaris Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Dr. H. Saefullah, M.Pd
NIP196402111984031002

Pihak Pertama,

Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta,

Hendra Hidayat, S. IP
NIP 197211191991011001

PERJANJIAN KERJA TAHUN 2017
BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL SETDA PROVINSI DKI JAKARTA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan pendidikan, keolahragaan, kepemudaan, perpustakaan daerah dan kearsipan daerah serta mental spiritual	Jumlah kebijakan Pendidikan , Olahraga dan Pemuda, Perpustakaan dan Kearsipan serta Mental Spiritual yang disusun	21 bahan kebijakan
2	Terkoordinasi, termonitor dan terevaluasinya kebijakan penyelenggaraan pendidikan, keolahragaan, kepemudaan, perpustakaan daerah dan kearsipan daerah serta mental spiritual	Jumlah koordinasi Pendidikan , Olahraga dan Pemuda, Perpustakaan dan Kearsipan serta Mental Spiritual yang dilakukan	9 dokumen
3	Terlayannya jemaah haji Provinsi DKI Jakarta dengan baik	Persentase Jamaah haji yang mendapatkan tambahan layanan dan pembinaan Pelaksanaan Ibadah Haji	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaia dan Persandian	Rp 264,784,734.00	APBD
2	Program Koordinasi Kebijakan Pendidikan dan Olahraga serta Pembinaan Mental Spiritual	Rp 4,890,215,284.00	APBD

Sekretaris Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Dr. H. Saefullah, M.Pd
NIP 196402111984031002

Jakarta, 27 Januari 2017
Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
Setda Provinsi DKI Jakarta



Hendra Hidayat, S.IP
NIP 197211191991011001